



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN PREKUSOR NON FARMASI  
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN**

**TESIS**

**MOHAMMAD AMIR NAWAWI  
0906505344**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
JUNI, 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN PREKUSOR NON FARMASI  
DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains**

**MOHAMMAD AMIR NAWAWI  
0906505344**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA  
JUNI, 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Mohammad Amir Nawawi**

**NPM : 0906505344**

**Tanda Tangan :**

**Tanggal : Juni 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : Mohammad Amir Nawawi  
NPM : 0906505344  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian  
Stratejik Penanganan Narkoba  
Judul Tesis : Efektivitas Pengawasan Prekursor Non Farmasi  
Dalam mencegah Terjadinya Penyimpangan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Kekhususan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr.dr.H.Hadiman,SH.,MSi.

Ketua Sidang : Dr.Amy.S.Rahayu,Msi.

Penguji : Dr.M.H.Thamrin



(.....)  
(.....)  
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penyusunan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Studi Ketahanan Nasional, Kajian Stratejik Penanganan Narkoba pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Drs. Gories Mere, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk dapat mengikuti jenjang pendidikan S-2 di Universitas Indonesia.
- (2) Prof.Dr.Chandra Wijaya, Msi selaku ketua program pasca sarjana Universitas Indonesia.
- (3) Dr.dr.H.Hadiman, SH., MSi. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran didalam mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis ini.
- (4) Dr. Amy.S. Rahayu, Msi selaku ketua sidang dan sekaligus penguji dalam tesis ini
- (5) Dr, M.H.Thamrin selaku penguji yang telah berkenan untuk menguji tesis ini
- (6) Orangtua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material maupun moril.
- (7) Pihak Direktorat Psicotropika dan Prekursor BNN yang telah membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan penulis.
- (8) Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan saudara-saudara semua. Dan semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohammad Amir Nawawi  
NPM / NIP : 0906505344  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Kekhususan : Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba  
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non – Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Efektivitas Pengawasan Prekursor Non Farmasi Dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : Juli 2011  
Yang menyatakan

(Mohammad Amir Nawawi)

## ABSTRAK

Nama : Mohammad Amir Nawawi  
Program studi : Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba  
Judul : Efektivitas Pengawasan Prekursor Non Farmasi Dalam Mencegah Terjadinya Penyimpangan.

Penelitian ini berfokus pada Efektivitas Pengawasan Prekursor non Farmasi Dalam mencegah Terjadinya Penyimpangan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.

Model operasional penelitian mengetahui tingkat keberhasilan dan capaian pengawasan prekursor non farmasi dalam upaya pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap prekursor. Informan penelitian ini terdiri dari Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN, Kasubdit Barang Limbah Daglu Kemendag, Kasubdit Renmin Dit Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam.

Prekursor narkotika dan psikotropika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau psikotropika. Sesuai dengan tujuan penggunaannya, Surat Persetujuan Impor Prekursor diterbitkan oleh dua instansi yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan. Mengingat Badan Badan Narkotika Nasional sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan Prekursor Non Farmasi dan sebagai penerbit Analisa Hasil Pengawasan Prekursor dalam rangka Sertifikasi Impor Prekursor Non Farmasi, maka penelitian ini hanya mencakup Prekursor untuk keperluan Non Farmasi.

Meningkatnya penyalahgunaan Narkoba dan semakin ketatnya pengawasan narkotika dan psikotropika di jalur resmi telah mendorong munculnya *clandestine laboratory* yang memproduksi narkotika dan psikotropika secara illegal.

Pengawasan prekursor harus dilakukan secara *full spectrum*, mulai dari *pre market* sampai dengan *post market*, artinya pengawasan itu harus menyeluruh tidak dipenggal-penggal (*fragmented*), berorientasi melindungi masyarakat bukan kekuatan/kewenangan mendistribusikan dan mutlak harus ada garis komando dan koordinasi yang efektif.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memeriksa, mencegah dan menguji suatu aktifitas agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu peran pengawasan menjadi sangat penting dalam melakukan pengawasan dari hulu sampai hilir, dimulai dari pengadaan, produksi sampai ke peredaran.

Kata Kunci :  
Efektivitas, Pengawasan ,Prekursor.

## ABSTRACT

Name : Mohammad Amir Nawawi  
Courses : National Resilience Study  
Title : The Effectiveness of Precursor Control of Non-Pharmaceutical In Preventing from Diversion

This research focuses on the Effectiveness of Precursor Control of Non-Pharmaceutical In Preventing from Diversion. This research includes a descriptive *qualitative research design*.

This operational model of research was conducted to determine the level of success and achievement of Non- Pharmacy Precursor Control which is related in efforts to prevent drug abuse. The sources of this research are Director of the Psychotropic and Precursor from National Narcotics Board, Head Sub Division of Precursors from National Narcotics Board, Director of Imported Precursors from Ministry of Trade of Republic of Indonesia, Head Sub Division of Miners and Waste from Ministry of Trade of Republic of Indonesia. The data was collected by interviewing the sources.

Narcotics and Psychotropics precursors is a substance that used to make narcotics or psychotropics. Appropriate with the objective of its usage, The Import Authorization approval precursor issued by 2 institutions that are The Department of Trade and The Department of Health. Considering that National Narcotics Boards as a institution that responsible on controlling non Pharmaceutical Precursors and as a issuer for The Precursor Control Analyses in term of import Authorization for non pharmaceutical precursors.

then this research only covered precursors for pharmaceutical needs. Precursor is the mostly used as the starting material or chemical substance where many of illicit drugs and psychotropic happened. The Precursor's control was strictly done *because of concerns when its use is not as intended or misused will cause health problems, economic instability, national insecurity and international crime.*

Supervision is an action which done to investigate, prevent, and verify an activity to avoid the deviation from the regulation that occurred. Therefore, the role of supervision becomes very important in conducting surveillance from upstream to downstream, starting from procurement, production to distribution.

In monitoring the implementation of precursor in an integrated cross-sector collaboration among others, it is required to form the task force of precursor. For that purpose, it needs to have a common perception among supervisory personnel, to realize a synergy to enhance knowledge and understanding of the precursors for the supervision of supervisory personnel in the prevention of precursor diversion.

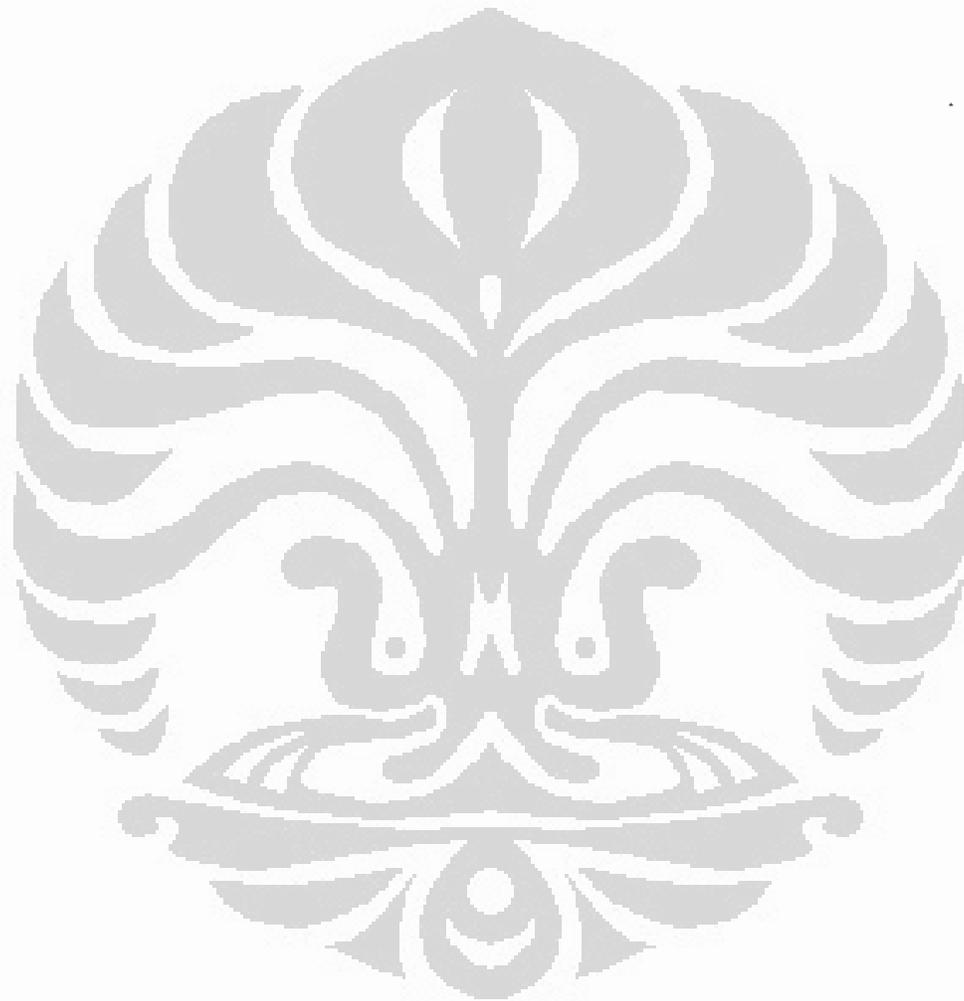
Keyword:  
Precursor, Control, Effectiveness

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1 Manfaat Akademis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Batasan Penelitian.....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Pengertian tentang Efektivitas.....	8
2.2 Pengertian tentang Pengawasan.....	11
2.3 Pengertian tentang Prekursor.....	14
2.4 Jenis dan karakteristik Prekursor.....	14
2.5 Tinjauan tentang Manajemen.....	19
2.5.1 Pengertian Manajemen.....	19
2.5.2 Fungsi Manajemen.....	20
2.5.3. Prinsip Manajemen.....	24
2.6 Tinjauan tentang Manajer.....	24
2.6.1. Pengertian tentang Manajemen.....	24
2.6.2. Tingkatan Manajer.....	24
2.6.3. Peran Manajer.....	25
2.6.4. Ketrampilan Manajer.....	26
2.7. Tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan.....	27
2.7.1. Pengertian Penyelidikan.....	27
2.7.2. Pengertian Penyidikan.....	27
2.8. Syarat-syarat Organisasi yang baik.....	28
2.9. Pengertian Kepemimpinan.....	30
<b>3. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
4.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi.....	34
4.1.1 Kedudukan.....	34

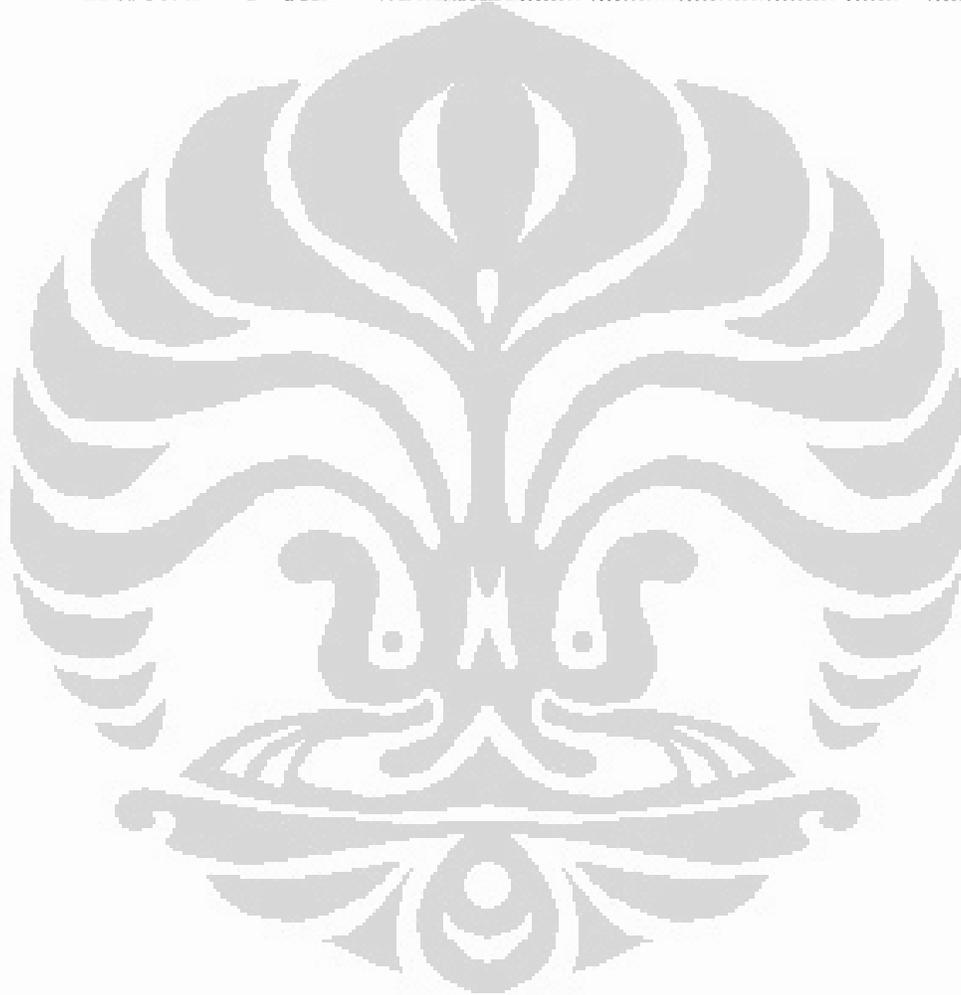
4.1.2 Tugas.....	34
4.1.3 Fungsi.....	34
4.2 Visi.....	34
4.3 Misi.....	35
4.4 Perkembangan Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN.....	35
4.5 Struktur Organisasi.....	36
4.4.1 Struktur Organisasi Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN.....	36
4.5.Konsep Pengawasan Prekursor di Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN.....	37
4.6.Sumber Daya Manusia di Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN.....	37
4.6.1. Latar belakang pendidikan.....	37
4.6.2. Jabatan struktural dan fungsional.....	38
<b>4. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1 Tipe Penelitian.....	39
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Objek Penelitian.....	40
3.4 Sumber Data.....	40
3.5 Teknis Pengumpulan Data.....	41
3.6 Teknis Analisis Data.....	41
3.7. Operasionalisasi Faktor-faktor yang akan diteliti.....	41
<b>5. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
5.1 Input dalam Struktur Organisasi.....	47
5.1.1 Profile.....	47
5.1.2 SDM.....	48
5.1.3 Anggaran.....	48
5.2 Proses dalam pelaksanaan kegiatan.....	49
5.2.1 Bentuk Kegiatan.....	50
5.2.2 Metode Pelaksanaan Kegiatan.....	50
5.2.3 Efektifitas dan efisien metode yang digunakan.....	51
5.2.4 Waktu yang diperlukan tiap pelaksanaan program kegiatan.....	52
5.2.5 Hasil Kegiatan.....	52
5.2.6 Evaluasi Metode yang digunakan.....	53
5.2.7 Tindak Lanjut setelah program kegiatan dilaksanakan.....	54
5.2.8 Parameter keberhasilan kegiatan.....	55
5.3 Output.....	55
5.3.1 Sasaran yang ingin dicapai.....	56
5.3.2 Controlling, monitoring program yang telah dilaksanakan.....	56
5.3.3 Koordinasi program kegiatan.....	57
5.4 Outcome.....	59
5.4.1 Kepuasan Program yang telah dilaksanakan.....	60
5.4.2 Persepsi Program yang telah dilaksanakan.....	60
5.5 Feedback.....	62
5.5.1 Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan.....	64
5.5.2 Upaya-upaya perbaikan terhadap kegiatan yang telah Dilaksanakan.....	64

<b>6. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
6.1 SIMPULAN.....	68
6.2 SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN. Wawancara.....	74



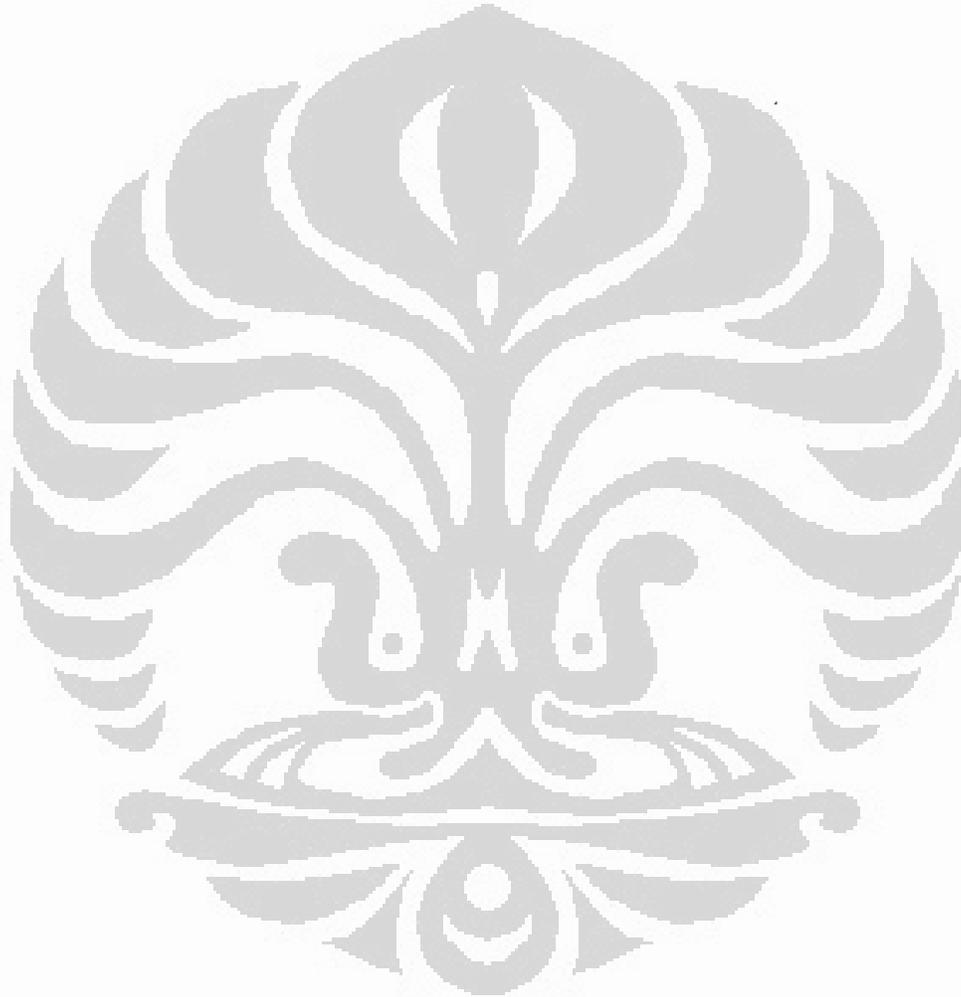
## DAFTAR TABEL

Tabel 2.4.1	Jenis-jenis Prekursor yang diawasi oleh UNODC.....	14
Tabel 2.4.2	Prekursor dalam Penampilan, Kegunaan ilegal dan Peringatannya.....	15
Tabel 2.4.3	Jenis-Jenis Prekursor dalam Penggunaannya.....	17
Tabel 3.7.1	Operasionalisasi faktor-faktor yang diteiiti.....	41
Tabel 3.7.2	Pedoman wawancara.....	43



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.7.1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Psikotropika dan  
Prekursor Badan Narkotika Nasional..... 37



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan zat Adiktif lainnya semakin meningkat tanpa mengenal strata usia, batas wilayah maupun negara. Berdasarkan hasil survei Badan Narkotika Nasional dengan Puslitkes UI diperkirakan jumlah penyalahguna 1,99% populasi penduduk di Indonesia usia 10-59 tahun sekitar 3,362 juta, 1,355 juta diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa, 2,007 juta bukan pelajar dan mahasiswa artinya terjadi pada TNI/Polri, PNS, Wiraswasta, Selebritis dsb. (sesuai hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI, 2008).

Meningkatnya penyalahgunaan Narkoba dan semakin ketatnya pengawasan narkotika dan psikotropika di jalur resmi telah mendorong munculnya *clandestine laboratory* yang memproduksi narkotika dan psikotropika secara illegal. Permasalahan yang dihadapi semakin bertambah dengan diketemukannya beberapa laboratorium produksi gelap narkotika dan psikotropika di negara kita, sehingga pengawasan ketat perlu dilakukan tidak hanya terhadap narkotika dan psikotropika, namun juga terhadap bahan-bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika secara illegal yang lazim disebut prekursor. Prekursor narkotika dan psikotropika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika.

Data BNN tahun 2000-2008 menyebutkan bahwa pada tahun 2000 kasus penyalahgunaan prekursor berjumlah 4 kasus dengan barang bukti 94.399,8 Kg Acetic Anhydride, tahun 2001 berjumlah 2 kasus dengan barang bukti 17.780 Kg Acetic Anhydride, tahun 2002 berjumlah 1 kasus dengan barang bukti 9 galon Piperonal metil keton, tahun 2003 berjumlah 1 kasus dengan barang bukti 20 Ton Kalium Permanganat, tahun 2005 berjumlah 2 kasus dengan barang bukti 17 galon PMK, tahun 2006 berjumlah 2 kasus dengan barang bukti 336 kg nor efedrine, tahun 2007 berjumlah 5 kasus dan tahun 2008 dengan barang bukti 277 kg Ketamin,

berjumlah 12 kasus dengan barang bukti 108,88 kg Efedrine dan 108,88 kg Efedrine. (Sumber : Direktorat IV/TP Narkoba dan KT Bareskrim Polri).

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah kasus penyimpangan prekursor tiap tahun mengalami peningkatan sehingga dapat diketahui bahwa kasus tindak pidana narkoba ini tiap tahunnya mengalami perkembangan yang tentu saja juga membutuhkan pengawasan yang ketat terkait produksi narkotika dan psikotropika ilegal.

Pada dasarnya prekursor digunakan secara *licit* (resmi) di industri farmasi sebagai obat, di industri makanan sebagai bahan tambahan pada makanan (*essence*), sebagai katalisator dan pelarut dalam industri kimia dan industri lainnya. Selain penggunaannya secara resmi, prekursor diduga sering disalahgunakan menyimpang ke jalur tidak resmi (*illicit*) untuk pembuatan narkotika dan psikotropika secara gelap seperti pembuatan : heroin, kokain, morfin, amfetamin, metamfetamin, MDA (*Methylnedioxyamphetamin*), MDMA (*Methylenedioxy methamfetamin/ecstasy*), N-hidroksi MDA, LSD (*Lysergic acid diethylamide*).

Mengingat penggunaannya yang luas di berbagai sektor industri, maka pelaksanaan pengawasan prekursor memerlukan kerjasama lintas sektor yang terpadu antar instansi terkait. Disamping itu karena lalu lintas perpindahan prekursor melampaui batas-batas negara, maka diperlukan juga pengawasan perdagangan prekursor secara internasional dengan menjalin kerjasama antar negara dan badan internasional terkait, agar penyimpangan penggunaannya dapat diminimalkan.

Menurut Al Bachri (2006) dalam pengawasan prekursor harus dilakukan secara *full spectrum*, mulai dari *pre market* sampai dengan *post market*, artinya pengawasan itu harus menyeluruh tidak dipenggal-penggal (*fragmented*), berorientasi melindungi masyarakat bukan kekuatan/kewenangan mendistribusikan dan mutlak harus ada garis komando dan koordinasi yang efektif.

Pengawasan terhadap pengadaan, produksi dan peredaran prekursor perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan (*diversi*) penggunaan prekursor untuk pembuatan narkotika dan psikotropika secara gelap. Prekursor secara resmi banyak digunakan di industri farmasi, industri makanan, industri kimia dan industri lainnya. Namun penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya.

Menurut pasal 12 Konvensi PBB 1988 suatu negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih ketat atau keras daripada yang diatur dalam konvensi PBB 1988, jika menurut negara tersebut tindakan-tindakan yang diinginkan dapat mencegah/memberantas peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Pengaturan tentang prekursor secara internasional telah ada pada *Single Convention on Narcotics of 1961, article 2 (8)*, *Convention on Psychotropic Substances of 1971, article 2 (9)*, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances of 1988, article 12*. Dengan berkembangnya jumlah prekursor yang diawasi secara internasional, Indonesia telah melakukan ratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs and Psychotropic Substances 1988*, sebelumnya telah dilakukan ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1976 dan *Convention on Psychotropic Substances 1971* dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1996.

Peraturan internasional tersebut menjadi dasar hukum bagi Indonesia dalam menyusun kebijakan yang diperlukan untuk melakukan pengawasan narkotika, psikotropika dan prekursor. Pengawasan prekursor di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1978 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 229/Menkes/Per/VII/1978 tentang Pengawasan Pipa Pemadatan dan Anhidrida Asam Asetat yang mengatur pengadaan, produksi, penyaluran dan penggunaannya. Pengaturan prekursor selanjutnya dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 917/Menkes/SK/VIII/1997 tentang jenis prekursor psikotropika dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/SK/VIII/1988 tentang jenis Prekursor Narkotika serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.35.02770/2002 tentang Penambahan jenis Prekursor, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.35.02771/2002 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor.

Oleh karena bahan baku prekursor yang dibutuhkan untuk pengobatan maupun lembaga ilmu pengetahuan masih harus diimpor dari negara luar antara lain Jerman, Amerika, France, Taiwan, China, India, Singapore dan lain sebagainya, sesuai Konvensi PBB 1988 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Pasal 12 menyatakan bahwa negara pihak dapat mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mencegah diversi penggunaan prekursor. Berpedoman pada konvensi tersebut maka negara Indonesia mempunyai kebijakan yang mengatur tentang mekanisme masuknya prekursor kedalam pabean Indonesia. Kebijakan tersebut antara lain menyatakan bahwa untuk mengimpor setiap jenis prekursor harus menggunakan Surat Persetujuan Impor (SPI) Prekursor. Dengan demikian SPI merupakan alat yang sah untuk memasukan prekursor yang dibutuhkan untuk industri farmasi, industri kimia dan ilmu pengetahuan.

Sesuai dengan tujuan dan penggunaannya, surat persetujuan impor prekursor diterbitkan oleh 2 (dua) instansi terkait yaitu kementerian Perdagangan dan Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Penindustrian dan Perdagangan RI Nomor 647/MPP/Kep/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor mengatur tentang penerbitan SPI untuk keperluan industri non farmasi (industri kimia dan industri umum) sedangkan Peraturan menteri Kesehatan RI Nomor 168/Menkes/Per/II/2005 tentang Prekursor Farmasi mengatur penerbitan SPI untuk prekursor farmasi. Mengingat Badan Narkotika nasional selaku pengawasa dan sebagai penerbit analisa hasil pengawasan prekursor non farmasi, maka penelitian ini hanya mencakup prekursor non farmasi dalam rangka pengawasan dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Surat Persetujuan Impor Prekursor untuk keperluan industri non farmasi baru dapat diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan RI setelah mendapat Analisa Hasil Pengawasan Prekursor dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Setiap permohonan SPI harus melalui penilaian dengan perhitungan yang cermat dan akurat, sehingga tidak terjadi kekosongan atau stock yang berlebihan yang mendorong terjadinya penyimpangan prekursor dari jalur resmi ke jalur tidak resmi (gelap).

Bahwa pengendalian dan pengawasan sebagai upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dan prekursor narkotika (P4GN) sangat membutuhkan langkah-langkah kongkrit terpadu dan terkoordinasi secara nasional, regional, maupun internasional karena kejahatan penyalahgunaan prekursor pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama, bahkan terorganisir rapi dan sangat rahasia bersifat transnasional dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih merupakan ancaman yang serius bagi kehidupan umat manusia. Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan serta penanggulangan penyalahgunaan prekursor melibatkan tugas dan fungsi berbagai instansi terkait.

Dalam tesis ini penulis akan lebih menekankan pada pembahasan mengenai prekursor non farmasi, oleh karena itu penulis mengambil judul :

**” EFEKTIFITAS PENGAWASAN PREKURSOR NON FARMASI DALAM MENCEGAH TERJADINYA PENYIMPANGAN”.**

## **1.2. Pokok Permasalahan**

Adapun pokok permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah sudah efektif pengawasan prekursor non farmasi, sehingga terjadi maraknya peredaran/distribusi prekursor secara ilegal saat ini ?
2. Apakah ketersediaan prekursor sesuai dengan peruntukannya saat ini ?
3. Apakah kendala internal dan eksternal dalam pengawasan prekursor saat ini ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis, apakah sudah efektif pengawasan prekursor non farmasi sehingga terjadi maraknya peredaran/distribusi prekursor secara ilegal saat ini.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis, apakah ketersediaan prekursor sesuai dengan peruntukannya saat ini.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis, apakah kendala internal dan eksternal dalam pengawasan prekursor saat ini.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademis**

Dari segi akademik penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam hal perkembangan prekursor sebagai bahan pembuat narkotika dan psikotropika. Diharapkan juga menjadi sumber atau pemikiran penulis dalam rangka memperluas dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Bermanfaat untuk mengetahui apakah efektifitas pengawasan prekursor non farmasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan telah optimal dalam pelaksanaannya sehingga diharapkan dapat bermanfaat dalam penyidikan maupun pengungkapan kasus narkoba dalam rangka program P4GN (pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba). Dengan demikian dapat menjadi bahan pertimbangan organisasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan narkoba.

#### **1.5. Batasan Penelitian**

Penulisan Tesis ini akan memaparkan gambaran umum tentang efektifitas pengawasan prekursor non farmasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

#### **1.6. Tata Urut Penulisan**

Tata urut penulisan penelitian ini akan diuraikan dari data-data yang didapat untuk menjawab permasalahan dan hasil penelitian ini dapat diuraikan secara sistematis dan jelas yang terdiri atas 6 Bab yaitu sebagai berikut:

- Bab I : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah yang mendasari mengapa penelitian dilaksanakan kemudian akan ditentukan pokok permasalahan selanjutnya ditentukan pertanyaan penelitian kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian.
- Bab II : Dalam bab ini akan dibahas teori-teori yang berhubungan dengan penelitian dan digunakan peneliti untuk analisis data diantaranya adalah jenis-jenis prekursor yang diawasi saat ini, definisi pengawasan, efektivitas, dan peran pengawasan prekursor.
- Bab III : Gambaran Umum Tempat Penelitian dalam bab ini akan diuraikan mengenai tempat penelitian (kedudukan, tugas BNN, fungsi BNN, visi BNN, misi BNN, perkembangan Direktorat psikotropika dan prekursor BNN, konsep pengawasan oleh direktorat psikotropika dan prekursor BNN dan SDM dan peralatan dalam mendukung kegiatan Direktorat psikotropika dan prekursor BNN).
- Bab IV : Dalam bab ini akan diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan serta teknik pengumpulan data dan cara untuk menganalisisnya.
- Bab V : Hasil penelitian dan pembahasan akan disampaikan secara deskriptif yang membahas efektivitas pengawasan prekursor non farmasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan dan memaparkan seluruh hasil penelitian.
- Bab VI : Bab ini adalah bab penutup, dimana penulis akan menyampaikan simpulan dan saran, kesimpulan akan menjawab permasalahan penelitian sementara saran akan diberikan secara aplikatif

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai prekursor, jenis dan karakteristik prekursor, pengertian pengawasan, pengertian efektifitas, kepemimpinan, manajemen, penyiidikan, penyidikan dan Penyidik

#### **2.1. Pengertian Efektifitas**

Efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektifitas penelitian dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektifitas.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi. Karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektifitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektifitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan.

Menurut Atmosoeparto (2002:139) menyatakan Efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar, atau efektifitas adalah sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Menurut David J. Lawless dalam Gibson, Ivancevich dan Donnely (1997:25-26) Efektivitas memiliki tiga tingkatan antara lain :

1. **Efektivitas Individu**

Efektivitas Individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi;

2. **Efektivitas kelompok**

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan Jumlah kontribusi dari semua anggota kelompoknya;

3. **Efektivitas Organisasi**

Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

Menurut Sharma dalam Tangkilisan (2005:64) memberikan kriteria atau ukuran efektivitas organisasi yang menyangkut faktor internal organisasi dan faktor eksternal organisasi antara lain:

1. Produktivitas organisasi atau output;
2. Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan di dalam dan di luar organisasi;
3. Tidak adanya ketegangan di dalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantara bagian-bagian organisasi.

Sedangkan menurut Steers dalam Tangkilisan (2005:64) mengemukakan lima kriteria dalam pengukuran efektivitas organisasi yaitu:

1. Produktivitas;
2. Kemampuan adaptasi atau fleksibilitas;
3. Kepuasan kerja;
4. Kemampuan ber laba;
5. Pencarian sumber daya.

Menurut Gibson dalam Tangkilisan (2005:65) mengatakan hal yang berbeda bahwa efektivitas organisasi dapat pula diukur melalui :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersedianya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Menurut Emerson dalam Handyaningrat (1996:16) mengatakan bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif. Masih dalam buku yang sama, Hal ini dipertegas kembali dengan pendapat Hasibuan

dalam Handayani (1996:16) bahwa “efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran eksplisit dan implisit”.

Menurut Miller dalam Handayani (1996:16) *“Effectiveness be define as the degree to which a social system achieve its goals. Effectiveness must be distinguished from efficiency. Efficiency is mainly concerned with goal attainments”*, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

Menurut Winardi (1992:84) menjelaskan “Efektivitas adalah hasil yang dicapai seorang pekerja dibandingkan dengan hasil produksi lain dalam jangka waktu tertentu”. Apabila peneliti kutipan ini, maka efektivitas adalah hasil yang diperoleh seorang pekerja dan dibandingkan dengan waktu yang dipergunakan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut.

Menurut Amirullah dan Ribdyah Hanafi (2002) efektivitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan ukuran maupun standar yang berlaku mencerminkan suatu perusahaan tersebut telah memperhatikan efektivitas operasionalnya.

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:27-29) konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan Tujuan dan pendekatan Sistem. Dua pendekatan tersebut antara lain : Pendekatan tujuan untuk menentukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambil sumber (input) dari sistem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich (1997:31-32), memberikan batasan dalam kriteria efektivitas organisasi melalui pendekatan teori sistem antara lain :

1. **Produksi**

Produksi merupakan Kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output yang sesuai dengan permintaan lingkungan.

2. **Efisiensi**

Konsep efisiensi didefinisikan sebagai angka perbandingan (rasio) antara output dan input. Ukuran efisiensi harus dinyatakan dalam perbandingan antara keuntungan dan biaya atau dengan waktu atau dengan output.

3. **Kepuasan**

Kepuasan menunjukkan sampai sejauh mana organisasi memenuhi kebutuhan para karyawan dan pengguna .

4. **Adaptasi**

Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi dapat menanggapi perubahan ekstern dan intern.

5. **Perkembangan**

Organisasi harus menginvestasi dalam organisasi itu sendiri untuk memperluas kemampuannya untuk hidup terus dalam jangka panjang.

6. **Hidup Terus**

Organisasi harus dapat hidup terus dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan oleh para pakar di atas, peneliti menggunakan teori Emerson dalam Handyaningrat (1996:16) bahwa "Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan". Jadi apabila tujuan tersebut telah dicapai, baru dapat dikatakan efektif.

## **2.2. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, mekanisme pengawasan di dalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan.

Pengertian tentang pengawasan sangat beragam dan banyak sekali pendapat para ahli yang mengemukakannya, namun demikian pada prinsipnya kesemua pendapat yang dikemukakan oleh para ahli adalah sama, yaitu merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*), yang dilakukan dalam rangka melakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan manajemen. Berikut beberapa pengertian tentang pengawasan dari para ahli:

Menurut Mockler (dalam Certo dan Certo, 2006:480) menyebutkan pengawasan sebagai : *Controlling is a systematic effort by business management to compare performance to predetermined standard, plans, or objectives to determine whether performance is in line with theses standards and presumably to take any remedial action required to see that human and other corporate resources are being used in the most effective and efficient way possible in achieving corporate objectives.*

Konsep pengawasan dari Mockler di atas, menekankan pada empat hal, yaitu (1) harus adanya rencana, standard atau tujuan sebagai tolak ukur yang ingin dicapai, (2) adanya proses pelaksanaan kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan, (3) adanya usaha membandingkan mengenai apa yang telah dicapai dengan standard, rencana, atau tujuan yang telah ditetapkan, dan (4) melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan demikian konsep pengawasan dari Mockler ini terlihat bahwa ada kegiatan yang perlu direncanakan dengan tolak ukur berupa kriteria, norma-norma dan standar, kemudian dibandingkan, mana yang membutuhkan koreksi ataupun perbaikan-perbaikan.

Menurut Admosudirdjo (dalam Febriani, 2005:11) yang mengatakan bahwa: Pada pokoknya *controlling* atau pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: "Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.” Ciri terpenting dari konsep yang dikemukakan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan-pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.

Menurut Terry (dalam Winardi, 1986:395) juga berpendapat tentang pengertian pengawasan ini, ia mengatakan bahwa: Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan.

Hal senada dikemukakan oleh Manullang (1977:136) bahwa: “Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”. Pada hakekatnya, pandangan Manullang di atas juga menekankan bahwa pengawasan merupakan suatu proses dimana pekerjaan itu telah dilaksanakan kemudian diadakan penilaian apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atukah terjadi penyimpangan-penyimpangan, dan tidak hanya sampai pada penemuan penyimpangan tetapi juga bagaimana mengambil langkah-langkah perubahan dan perbaikan sehingga organisasi tetap dalam kondisi yang sehat.

Bertitik tolak dari pengertian para ahli tentang pengawasan sebagai mana diungkapkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang sistematis untuk membandingkan (memastikan dan menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi yang akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan standard, rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna pemanfaatan manusia dan sumber daya lain yang paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan.

### 2.3. Pengertian Prekursor

Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Kemenperrindag Nomor : 647/MPP/KEP/10/2004 tentang Ketentuan Impor Prekursor, yang dimaksud dengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan baku/penolong untuk keperluan proses produksi industri dan apabila disampingkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan Narkotika dan Psikotropika.

Menurut Al Bachri (2006), Prekursor adalah bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan. Bahan ini biasa digunakan untuk memproses atau membuat Narkotika atau Psikotropika. Prekursor secara kimia dapat bergabung dengan zat lain., untuk dijadikan Narkoba, atau dapat bekerja sebagai zat asam dalam pembentukan garam Narkoba. Pada umumnya Prekursor digunakan secara sah/resmi dalam proses industri dan sebagian besar diperdagangkan dalam perdagangan Internasional.

### 2.4. Jenis dan Karakteristik Prekursor

Berdasarkan jenisnya, prekursor dibagi menjadi 2 yaitu : Prekursor Psikotropika dan Prekursor Narkotika (Kepmenkes RI Nomor 890/MENKES/VIII/1998 tentang jenis Prekursor Narkotika). Sedang berdasarkan penggolongan kegunaannya dibedakan menjadi farmasi, perbatasan antara Farmasi dan Non Farmasi (kimia).

Prekursor juga dibagi berdasarkan 2 tabel, yaitu : Tabel I : bahan kimia yang digunakan sebagai Bahan Pemula untuk membuat Narkotika dan Psikotropika. Sedang Tabel II : bahan kimia yang digunakan sebagai pereaksi atau untuk membuat Narkotika dan Psikotropika. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2.4.1 Jenis-jenis Prekursor yang diawasi menurut *International Narcotics Control Board (INCB)***

TABEL I	TABEL II
1.Acetic Anhydride	15. Aceton
2.N-Acetylanthranilic Acid	16. Anthranilic Acid
3.Ephedrine	17. Ethyl Ether

4.Ergometrine	18. Hydrochloric Acid
5.Ergotamine	19. Methyl Ethyl Ketone
6.Isosafrole	20. Phenylacetic Acid
7.Lysergic Acid	21. Piperidine
8.3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone	22. Sulphure Acid
9.Norephedrine	23. Toluenc.
10.1-Phenyl-2-Propanone	
11.Piperonal	
12.Potassium Permanganat	
13.Pseudoephedrine	
14.Safrole.	

Sumber : Lampiran *International Narcotics Control Board (INCB)*

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jenis prekursor yang diawasi di Indonesia mengacu pada ketentuan internasional yang tercantum dalam *Red List* yaitu suatu daftar bahan-bahan prekursor yang diawasi secara internasional yang ditetapkan oleh *International Narcotics Control Board (INCB)*. Dalam *Red List* tersebut Prekursor dibagi menjadi tabel I dan Tabel II. Pembagian Prekursor menjadi tabel I dan Tabel II, berdasarkan potensi bahayanya : Tabel I merupakan prekursor sesungguhnya (*true precursors*) dan Tabel II biasanya disebut Bahan Kimia *Esensial* yaitu bahan-bahan yang dapat digunakan dalam proses kimia untuk pembuatan bahan-bahan yang diawasi, berfungsi sebagai pelarut, pereaksi, katalisator, oksidator, asam atau basa.

Mengenai jenis-jenis yang tergolong dalam prekursor ada yang telah ditetapkan atau ditentukan jenis-jenis/bahan kimianya dalam konvensi PBB 1988 tentang pemberantasan gelap narkoba dan psiktropika adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.4.2. Prekursor dalam penampilan, kegunaan ilegal dan peringatannya.**

Prekursor	Penampilan	Penggunaan ilegal	Peringatan
Asetik anhidrida	Cairan tanpa warna, bau yang mencekik mirip cuka	Memproduksi Heroin	Mudah terbakar, sangat korosif

Aseton	Cairan tanpa warna, cepat menguap, berbau seperti kuteks (pewarna kuku)	Heroin, methamfetamin, MDMA	Sangat mudah terbakar, hindari menghirup baunya
Kloroform	Tanpa warna, mudah bergerak, cepat menguap, cairan tidak bisa terbakar, berbau manis.	Heroin, methamfetamin, MDMA	Hindari menghirup uapnya
Efedrin	Kristal-kristal atau butiran kecil dan terasa seperti sabun bila dipegang, atau kristal-kristal kecil berbentuk jarum. Warna putih atau agak kekuningan.	Metamfetamin	Berbahaya jika di telan
Etil ether	Cairan tanpa warna, mudah bergerak, mudah menguap, berbau maniskeras dan rasa yang membakar.	Heroin, methamfetamin, MDMA	Sangat mudah terbakar, hindari menghirup baunya
Asam Hidroklorik	Cairan bening, berkisar dari tanpa warna hingga kuning muda, berasap dengan bau yang keras.	Heroin, methamfetamin, MDMA	Sangat korosif, hindari menghirup uapnya
1-fenil-2-propanon (P2P)	Cairan tanpa warna atau agak kekuningan, kekentalan sedang	Metamfetamin	Sangat korosif, hindari kontak kulit dan mata
Asam Fenilasetik	Bubuk putih dengan bau keras	Metamfetamin	Tingkat racun sedang, dapat terbakar bila dekat api
Asam Sulfur	Cairan berminyak yang	Methamfetamin	Sangat korosif

	bening, tanpa warna, tanpa bau, lebih kental daripada air.	dan MDMA	
Thionil Klorida	Cairan berasap, berkisar dari tanpa warna hingga kuning pucat atau agak kemerahan.	Metamfetamin	Sangat korosif

Sumber : Majalah Sadar Edisi No.04/Th.IV/April2006

Dari tabel di atas dapat diperoleh suatu penjelasan bahwa daftar berbagai penampilan prekursor diatas dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psiktropika secara gelap, seperti heroin, *amfetamin*, *methamfetamin* dan berbagai sintesis obat lainnya. Dengan demikian prekursor memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena merupakan komoditi perdagangan (nasional/internasional), yang dipergunakan untuk keperluan industri farmasi dan non farmasi.

**Tabel 2.2.1. Jenis dan Karakteristik Prekursor dalam penggunaannya**

JENIS-JENIS PREKURSOR	NARKOTIKA	PSIKOTROPIKA	FARMASI	PERBATASAN	NON FARMASI
<b>TABEL I (Bahan Pemula)</b>					
1. Efedrin	X		X		
2. Ergometrin	X		X		
3. Ergotamin	X		X		
4. Asam lisergat	X			X	
5. 1-fenil-2-propanon	X			X	
6. Pseudoefedrin	X		X		
7. Asam N-asetil antranilat	X			X	
8. Isosafrol	X			X	
9. 3,4-metilendioksi fenil-2-propanon	X			X	
10. Piperonal	X			X	

	bening, tanpa warna, tanpa bau, lebih kental daripada air.	dan MDMA	
Thionil Klorida	Cairan berasap, berkisar dari tanpa warna hingga kuning pucat atau agak kemerahan.	Metamfetamin	Sangat kerosif

Sumber : Majalah Sadar Edisi No.04/Th.IV/April2006

Dari tabel di atas dapat diperoleh suatu penjelasan bahwa daftar berbagai penampilan prekursor diatas dapat digunakan dalam pembuatan narkotika dan psikotropika secara gelap, seperti heroin, *amfetamin*, *methamfetamin* dan berbagai sintetis obat lainnya. Dengan demikian prekursor memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi karena merupakan komoditi perdagangan (nasional/internasional), yang dipergunakan untuk keperluan industri farmasi dan non farmasi.

**Tabel 2.4.3. Jenis dan Karakteristik Prekursor dalam penggunaanya**

JENIS-JENIS PREKURSOR	NARKO TIKA	PSIKO TROPIKA	FARM ASI	PERBA TASAN	NON FARMASI
<b>TABEL I (Bahan Pemula)</b>					
1. Efedrin	X		X		
2. Ergometrin	X		X		
3. Ergotamin	X		X		
4. Asam lisergat	X			X	
5. 1-fenil-2-propanon	X			X	
6. Pseudoefedrin	X		X		
7. Asam N-asetil antranilat	X			X	
8. Isosafrol	X			X	
9. 3,4-metilendioksi fenil-2-propanon	X			X	
10. Piperonal	X			X	

11. Safrol	X			X	
12. Norefedrin			X		
13. Anhidrida asetat		X		X	
14. Kalium Permanganat		X		X	

**TABEL II (Pelarut)**

Jenis-jenis Prekursor	Narkotika	Psikotropika	Farmasi	Perbatasan	Non Farmasi
1. Aseton	X	X			X
2. Asam antranilat	X				
3. Etil eter	X	X			X
4. Asam fenil asetat	X				
5. Peperidine	X				
6. Asam klorida	X	X			X
7. Metil etil keton		X			X
8. Asam sulfat	X	X			X
9. Toluena	X	X			X

Sumber : Kepmenkes RI Nomor 890/MENKES/VIII/1998 tentang Jenis dan Karakteristik Prekursor Narkotika dan Prekursor Psikotropika.

Dari tabel di atas secara fisik, beberapa penampilan dari prekursor, antara lain: berbentuk (cairan dan bubuk), warna (bening, putih, kuning muda, kemerah-merahan), bau (keras, menyengat dan ada yang tak berbau). Sebagai bahan yang tergolong berbahaya, zat kimia yang termasuk dalam kelompok prekursor memiliki sifat-sifat seperti mudah terbakar dan menguap, mudah meledak, korosif (merusak), oksidasi, racun dan menyebabkan reaksi kimia. Prekursor dikemas dalam berbagai wadah, antara lain : tong drum baja, tong karton, kantong dan plastik, jerigen plastik dan botol kaca.

Mengingat bentuk fisik prekursor yang mudah meledak dan beracun, maka keberadaan sebuah clandestine laboratory di tengah –tengah masyarakat menjadi sangat berbahaya dan mengancam kelangsungan hidup baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Pada jangka pendek, ancaman yang nyata, seperti : suhu yang tinggi akibat pemanasan dan gangguan arus listrik menyebabkan

kebakaran; kebakaran berpotensi menimbulkan ledakan dari bahan-bahan yang mudah meledak; ledakan dari bahan-bahan prekursor yang beracun, kontaminasi gas dan bahan kimia lainnya mampu mengancam pekerja dan pemukiman di sekitarnya.

Perlu diketahui bahwa limbah dari polutan clandestine laboratorium sulit dikelola dan diurai tanah. Kalaupun bisa, menurut penilaian *US-DEA* (United States – Drugs Enforcement Administration), membutuhkan biaya milyaran hingga triliunan rupiah, seperti limbah clandestine laboratorium Ang Kiem Soei (2003). Menurut UNODC, proses memproduksi Narkoba menghasilkan 5-6 kg limbah kimia untuk setiap kilogram Narkoba yang diproduksi.

Pada jangka menengah, ancaman bahayanya adalah polusi udara, air dan tanah dari limbah clandestine laboratory; bahan kimia dan obat mengancam kelangsungan hidup baik di lingkungan pemukiman, pertanian, ekosistem, ekologi dan sebagainya. Sedang pada jangka panjang, akan merugikan negara baik dari kejahatan penyelundupan bahan-bahan tersebut karena menghindari bea dan cukai, kejahatan peredaran gelap Narkoba (ATS) dan Tindak Pidana Pencucian Uang bahkan juga Terorisme, untuk pembuatan bahan peledak.

Berkaitan dengan Ditjen Bea dan Cukai, menurut data Ditjen Bea dan Cukai (2008), pada kurun waktu lima tahun (2003-2007) telah terjadi kegagalan penyelundupan barang bukti Narkoba sebanyak 52 kasus, yaitu 11 kasus (2003), 9 kasus (2004), 9 kasus (2005), 3 kasus (2006) dan 20 kasus (2007). Kegagalan ini dilakukan oleh satgas airport dan seaport interdiction di bawah koordinator Ditjen Bea dan Cukai. Dengan upaya kegagalan ini aset negara diselamatkan sebesar Milyaran rupiah.

## **2.5. Tinjauan tentang Manajemen**

### **2.5.1. Pengertian Manajemen**

Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia *maneggiare* yang berarti “mengendalikan,” terutamanya “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”. Kata ini mendapat

pengaruh dari bahasa Perancis *manège* yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari Bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Perancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi *ménagement*, yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur.

Menurut Mary Parker Follet, manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Ricky W. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Menurut George R. Terry (2006:67), manajemen sebagai “proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain”.

### **2.5.2. Fungsi Manajemen**

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut Henry Fayol menyebutkan fungsi manajemen, yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:

#### **A. Planning**

Berbagai batasan tentang planning dari yang sangat sederhana sampai dengan yang sangat rumit. Misalnya yang sederhana saja merumuskan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Pembatasan yang terakhir merumuskan perencanaan merupakan penetapan jawaban kepada enam pertanyaan berikut :

1. Tindakan apa yang harus dikerjakan ?

2. Apakah sebabnya tindakan itu harus dikerjakan ?
3. Di manakah tindakan itu harus dikerjakan ?
4. kapankah tindakan itu harus dikerjakan ?
5. Siapakah yang akan mengerjakan tindakan itu ?
6. Bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu ?

Menurut Stoner Planning adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran tadi.

#### B. Organizing

*Organizing* (organisasi) adalah dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah sasaran.

#### C. Leading

Pekerjaan leading meliputi lima kegiatan yaitu :

- Mengambil keputusan
- Mengadakan komunikasi agar ada saling pengertian antara manajer dan bawahan.
- Memberi semangat, inspirasi, dan dorongan kepada bawahan supaya mereka bertindak.

Memilih orang-orang yang menjadi anggota kelompoknya, serta memperbaiki pengetahuan dan sikap-sikap bawahan agar mereka terampil dalam usaha mencapai tujuan yang ditetapkan.

#### D. Directing/Commanding

*Directing* atau *Commanding* adalah fungsi manajemen yang berhubungan dengan usaha memberi bimbingan, saran, perintah-perintah atau instruksi kepada bawahan dalam melaksanakan tugas masing-masing, agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar-benar tertuju pada tujuan yang telah ditetapkan semula.

#### E. Motivating

*Motivating* atau pemotivasian kegiatan merupakan salah satu fungsi manajemen berupa pemberian inspirasi, semangat dan dorongan kepada bawahan, agar bawahan melakukan kegiatan secara suka rela sesuai apa yang diinginkan oleh atasan.

#### F. Coordinating

*Coordinating* atau pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, perkecokan,

kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerja sama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

#### G. Controlling

Controlling atau pengawasan, sering juga disebut pengendalian adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian, bila perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud dengan tujuan yang telah digariskan semula.

#### H. Reporting

Adalah salah satu fungsi manajemen berupa penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan atau pemberian keterangan mengenai segala hal yang bertalian dengan tugas dan fungsi-fungsi kepada pejabat yang lebih tinggi.

#### I. Staffing

Staffing merupakan salah satu fungsi manajemen berupa penyusunan personalia pada suatu organisasi sejak dari merekrut tenaga kerja, pengembangannya sampai dengan usaha agar setiap tenaga memberi daya guna maksimal kepada organisasi.

#### J. Forecasting

Forecasting adalah meramalkan, memproyeksikan, atau mengadakan taksiran terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi sebelum suatu rancangan yang lebih pasti dapat dilakukan.

#### K. Tool of Management

Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan diperlukan alat-alat sarana (*tools*). *Tools* merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. *Tools* tersebut dikenal dengan 6M, yaitu *men, money, materials, machines, method, dan markets*.

- *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang berkerja sama untuk mencapai tujuan.

- *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.
- *Material* terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.
- *Machine* atau Mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja.
- *Metode* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan manajer. Sebuah metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam manajemen tetap manusianya sendiri.
- *Market* atau pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli (kemampuan) konsumen.

### 2.5.3. Prinsip manajemen

Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Perancis, prinsip-prinsip umum manajemen ini terdiri dari :

1. Pembagian kerja (*Division of work*)
2. Wewenang dan tanggung jawab (*Authority and responsibility*)
3. Disiplin (*Discipline*)
4. Kesatuan perintah (*Unity of command*)
5. Kesatuan pengarahan (*Unity of direction*)
6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri
7. Penggajian pegawai
8. Pemusatan (*Centralization*)
9. Hirarki (tingkatan)
10. Ketertiban (*Order*)
11. Keadilan dan kejujuran
12. Stabilitas kondisi karyawan
13. Prakarsa (*Inisiative*)
14. Semangat kesatuan, semangat korps.

### 2.6. Tinjauan tentang Manajer

Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi.

#### 2.6.1. Tingkatan manajer

Pada organisasi berstruktur tradisional, manajer sering dikelompokkan menjadi manajer puncak, manajer tingkat menengah, dan manajer lini pertama (biasanya digambarkan dengan bentuk piramida, di mana jumlah karyawan lebih besar di bagian bawah daripada di puncak).

Manajemen lini pertama (*first-line management*), dikenal pula dengan istilah manajemen operasional, merupakan manajemen tingkatan paling rendah yang bertugas memimpin dan mengawasi karyawan non-manajerial yang terlibat

dalam proses produksi. Mereka sering disebut penyelia (*supervisor*), manajer *shift*, manajer area, manajer kantor, manajer departemen, atau mandor (*foreman*).

Manajemen tingkat menengah (*middle management*) mencakup semua manajemen yang berada di antara manajer lini pertama dan manajemen puncak dan bertugas sebagai penghubung antara keduanya. Jabatan yang termasuk manajer menengah di antaranya kepala bagian, pemimpin proyek, manajer pabrik, atau manajer divisi.

Manajemen puncak (*top management*), dikenal pula dengan istilah *executive officer*, bertugas merencanakan kegiatan dan strategi perusahaan secara umum dan mengarahkan jalannya perusahaan. Contoh *top manajemen* adalah CEO (*Chief Executive Officer*), CIO (*Chief Information Officer*), dan CFO (*Chief Financial Officer*).

Meskipun demikian, tidak semua organisasi dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan menggunakan bentuk piramida tradisional ini. Misalnya pada organisasi yang lebih fleksibel dan sederhana, dengan pekerjaan yang dilakukan oleh tim karyawan yang selalu berubah, berpindah dari satu proyek ke proyek lainnya sesuai dengan permintaan pekerjaan.

### 2.6.2. Peran manajer

Menurut Henry Mintzberg, seorang ahli riset ilmu manajemen, mengemukakan bahwa ada sepuluh peran yang dimainkan oleh manajer di tempat kerjanya. Ia kemudian mengelompokkan kesepuluh peran itu ke dalam tiga kelompok. Yang pertama adalah peran antar pribadi, yaitu melibatkan orang dan kewajiban lain, yang bersifat seremonial dan simbolis. Peran ini meliputi peran sebagai figur untuk anak buah, pemimpin, dan penghubung. Yang kedua adalah peran informasional, meliputi peran manajer sebagai pemantau dan penyebar informasi, serta peran sebagai juru bicara. Yang ketiga adalah peran pengambilan keputusan, meliputi peran sebagai seorang wirausahawan, pemecah masalah, pembagi sumber daya, dan perunding.

### 2.6.3. Keterampilan manajer

Robert L. Katz (1970) mengemukakan bahwa setiap manajer membutuhkan minimal tiga keterampilan dasar. Ketiga keterampilan tersebut adalah:

#### 1. Keterampilan konseptual (*conceptional skill*)

Manajer tingkat atas (*top manager*) harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang kongkret itu biasanya disebut sebagai *proses perencanaan* atau *planning*. Oleh karena itu, keterampilan konseptual juga merupakan keterampilan untuk membuat *rencana kerja*.

#### 2. Keterampilan berhubungan dengan orang lain (*humanity skill*)

Selain kemampuan konseptual, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain, yang disebut juga keterampilan kemanusiaan. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kepatutan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan, baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah.

#### 3. Keterampilan teknis (*technical skill*)

Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi dan lain-lain.

## **2.7. Tinjauan tentang Penyelidikan dan Penyidikan**

### **2.7.1. Pengertian Penyelidikan**

Menurut H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein (1992 : 21-27). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana benar-benar merupakan suatu tindak pidana penyelidik harus dapat mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana. Secara umum dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan diabaikan, yang apabila dilakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang. Dengan demikian setiap tindak pidana harus mengandung unsure melawan hukum dan atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Sedangkan untuk dapat menentukan suatu tindak pidana dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, harus tersedia bukti permulaan atau bukti yang cukup.

. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukannya penyelidikan. Dengan demikian fungsi penyelidikan dilaksanakan sebelum dilakukan penyidikan, yang bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya yang nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Kemudian penyelidik mengumpulkan data dan fakta yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh penyelidik tersebut, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan (H. Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992: 20-21).

### **2.7.2. Pengertian Penyidikan**

Menurut M. Yahya Harapan (1998 : 99-100) pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti

permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang acara pidana, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya.

Oleh karena itu, secara kongkrit dapat dikatakan bahwa penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang:

- a. Tindak pidana apa yang telah dilakukannya.
- b. Kapan tindak pidana itu dilakukan.
- c. Dimana tindak pidana itu dilakukan.
- d. Dengan apa tindak pidana itu dilakukan.
- e. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan.
- f. Mengapa tindak pidana itu dilakukan.
- g. Siapa pembuatnya.

Penyidikan sebagai bagian terpenting dalam Hukum Acara pidana yang pada pelaksanaannya kerap kali harus menyinggung mertabat individu yang dalam persangkaan kadang-kadang wajib untuk dilakukan. Suatu semboyan penting dalam hukum Acara Pidana yaitu hakikat penyidikan perkara pidana adalah untuk menjernihkan persoalan sekaligus menghindarkan orang yang tidak bersalah dari tindakan yang seharusnya dibebankan padanya.

Oleh karena itu sering kali proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik membutuhkan waktu yang cenderung lama, melelahkan dan mungkin pula dapat menimbulkan beban psikis diusahakan dari penghentian penyidikan.

## **2.8. Syarat-syarat Organisasi yang baik**

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Menurut Keith Davis (1962:15-19) Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena memberikan kontribusi seperti; pengambilan

sumber daya manusia dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya sehingga menekan angka pengangguran.

Syarat organisasi yang baik adalah adanya landasan yang harus dipenuhi untuk bisa membentuk organisasi yang reliable. Selanjutnya, kapabilitas manajemenlah yang menentukan, apakah potensi yang dimiliki bisa dibangun dan dikembangkan untuk meraih tujuan atau terbengkalai menjadi kesia-siaan. Manajemen organisasi mencakup beberapa bidang, diantaranya:

#### 1. Leadership

Kepemimpinan merupakan gambaran “wajah” dan arah organisasi, yang tentunya akan mewarnai “hati” organisasi. Pemimpin dan kepemimpinanlah yang dapat mengguratkan senyum, bingung, tangis atau marah. Inilah yang semestinya menjadi fokus kita dan bukan hasil. Guratan wajah organisasi adalah sesuatu yang masih berada dalam jangkauan usaha kita, sedangkan hasil adalah anugrah, apapun bentuknya. Hasil secara logika adalah sesuatu yang kita peroleh sebagai konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Jadi bila kita usahakan yang terbaik, maka insya ALLAH hasil yang diperolehpun baik. Seorang bijak mengatakan, “yang terpenting bukanlah hasil apa yang telah kita peroleh, tapi usaha-usaha apa yang telah kita lakukan untuk memperolehnya”. Secara umum, kepemimpinan mencakup wilayah kerja organisatoris dan wilayah kerja humanis.

#### 2. Inter-personal relationship

Organisasi adalah keluarga dan bukan pabrik. Setiap anggota yang terlibat didalamnya menyertakan berbagai nuansa manusiawi dalam pengejawantahan amanah yang diembankan. Kurangnya perhatian terhadap hal ini akan mengakibatkan munculnya kerentanan perpecahan dan hilangnya dedikasi terhadap organisasi. Manajemen di bidang relasi antar personal mengarah kepada:

a. Perspektif yang baik terhadap *positioning* SDM.

b. Aku bagian penting yang menentukan hidup matinya teman-temanku

#### 3. Problem solving capability

Mencakup pemahaman “siapa mampu apa”.

#### 4. Kesegaran udara organisasi

Atmosfer yang baik menyebabkan pohon tumbuh berbuah manis. Pemahaman akan pentingnya pembentukan suasana yang menyenangkan di organisasi akan menumbuhkan kerinduan tiap anggota terhadap organisasi, dan kerinduan adalah pendorong yang indah bagi pelaksanaan suatu pekerjaan.

5. Manajemen waktu.

## 2.8. Pengertian Kepemimpinan

Menurut Wahyu Soemijo ( 1991 ). Kepemimpinan ialah kemampuan seseorang mempengaruhi perilaku orang lain untuk berpikir dan berperilaku dalam rangka perumusan dan pencapaian tujuan organisasi di dalam situasi tertentu.

Menurut James Stoner ( 1986 ), pengertian kepemimpinan yaitu Proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari para anggota kelompok.

Berdasarkan pendapat dua tokoh tersebut dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan dari individu di dalam mempengaruhi orang lain untuk bertindak dan melaksanakan tugas tertentu. Pengertian ini mengandung beberapa unsur pokok, yaitu :

- a. Kepemimpinan harus melibatkan orang lain, yaitu pengikut atau bawahan. Karena Kesiediaan mereka menerima pengarahan dari pemimpin, anggota kelompok membantu menegaskan status pemimpin dan memungkinkan proses kepemimpinan. Tanpa bawahan semua sifat-sifat kepemimpinan akan menjadi tidak relevan.
- b. Kepemimpinan mencakup distribusi kekuasaan yang tidak sama diantara pemimpin dan anggota kelompok. Pemimpin mempunyai wewenang untuk mengarahkan beberapa aktivitas anggota kelompok, yang tidak dapat dengan cara yang sama mengarahkan aktivitas pemimpin.
- c. Pemimpin bisa mempengaruhi pengikut atau bawahannya dan bias mengarahkannya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Fungsi kepemimpinan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Fungsi Tugas

Fungsi yang bertalian dengan tugas dan mencakup fungsi-fungsi member saran pemecahan dan memberi informasi dan pendapatan.

b. Fungsi Pembinaan

Fungsi pembinaan kelompok meliputi segala sesuatu yang membantu kelompok beroperasi secara lebih lancar – misalnya, menyetujui atau memberi pujian pada anggota lain dalam kelompoknya dan menengahi ketidaksepakatan dalam kelompok.

Seorang pimpinan yang memusatkan perhatiannya pada fungsi tugas dapat memaksakan gagasannya dan mendorong kelompok untuk cepat mengambil keputusan. Sebaliknya, fungsi pembinaan kelompok menghancurkan individu tetap tanggap terhadap gagasan dan perasan dari anggota kelompok lainnya. Seorang individu yang mampu melaksanakan kedua peran tersebut secara berhasil jelas akan menjadi seorang pemimpin yang sangat efektif.

Prinsip – prinsip kepemimpinan :

1. Mampu menjadi teladan yang baik
2. Memiliki rasa tanggung jawab
3. Berani mengambil desisi an bersedia menerima resiko
4. Ciptakan *sense of belonging* dari para bawahan dan ciptakan *sense of participation*.
5. Ciptakan kerjasama yang baik di kalangan anggota.

Pendekatan tingkah laku kepemimpinan menekankan gaya kepemimpinan dalam hubungannya dengan bawahan. Menurut James A.F. Stoner (1998) berdasarkan cara pemimpin mengarahkan dan mempengaruhi bawahan, ada gaya kepemimpinan utama yaitu :

- a. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas atau berpusat produksi, dimana pimpinan memberikan pengarahan yang terinci dan pengawasan yang ketat pada bawahan guna menjamin pelaksanaan tugas sesuai dengan pemimpin.
- b. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada karyawan atau berpusat pada kemanusiaan, dimana pimpinan lebih cenderung memberi motivasi, mengundang partisipasi, serta menciptakan hubungan saling dan menghormati.

Menurut Koontz, O'Donnell dan Weihhrich, gaya kepemimpinan dapat digolongkan berdasarkan cara pemimpin menggunakan kekuasaannya, ada tiga gaya kepemimpinan, yaitu :

- a. Otokratik, pemimpin dipandang sebagai orang yang memberi perintah dan yang dapat menuntut keputusan ada ditangan pemimpin.
- b. Demokratik atau partisipatif, pemimpin dipandang sebagai orang yang tidak akan melakukan suatu kegiatan tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu pada bawahannya. Jadi pemimpin mengikut sertakan pendapat bawahan sebelum mengusulkan suatu kegiatan atau keputusan.
- c. Free Rein, pemimpin hanya menggunakan sedikit kekuasaan, dan memberikan banyak kebebasan bawahannya untuk melakukan kegiatan. Pemimpin memberi kekuasaan kepada bawahannya untuk menentukan tujuan perusahaan dan cara untuk mencapainya, pemimpin hanya berfungsi sebagai fasilitator .

Menurut Dr. Roeslan Abdulgani seorang pemimpin harus memiliki kelebihan dalam 3 hal dari orang-orang yang dipimpinnya :

1. Kelebihan dalam bidang ratio. Artinya seseorang pemimpin harus memiliki pengetahuan tentang tujuan dan asas organisasi yang dipimpinnya. Memiliki pengetahuan tentang cara-cara untuk menjalankan organisasi secara efisien. Dan dapat memberikan keyakinan kepada orang-orang yang dipimpin ke arah berhasilnya tujuan.
2. Kelebihan dalam bidang rohaniah. Artinya seorang pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang memancarkan keluhuran budi, ketinggian moral, dan kesederhanaan watak.
3. Kelebihan dalam bidang lahiriah/jasmaniah. Artinya dengan kelebihan ketahanan jasmaniah ini seorang pemimpin akan mampu memberikan contoh semangat dan prestasi kerja sehari-hari yang baik kepada orang-orang yang dipimpin.

Terry menyebutkan adanya 8 buah syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin yang baik, yaitu memiliki:

1. Kekuatan atau energy Seorang pemimpin harus memiliki kekuatan lahiriah dan rokhaniah sehingga mampu bekerja keras dan banyak berfikir untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi.

2. Penguasaan emosional Seorang pemimpin harus dapat menguasai perasaannya dan tidak mudah marah dan putus asa.
3. Pengetahuan mengenai hubungan kemanusiaan Seorang pemimpin harus dapat mengadakan hubungan yang manusiawi dengan bawahannya dan orang-orang lain, sehingga mudah mendapatkan bantuan dalam setiap kesulitan yang dihadapinya.
4. Motivasi dan dorongan pribadi, yang akan mampu menimbulkan semangat, gairah, dan ketekunan dalam bekerja.
5. Kecakapan berkomunikasi: kemampuan menyampaikan ide, pendapat serta keinginan dengan baik kepada orang lain, serta dapat dengan mudah mengambil intisari pembicaraan.
6. Kecakapan mengajar pemimpin yang baik adalah guru yang mampu mengajar dan memberikan teladan dan petunjuk-petunjuk, menerangkan yang belum dengan gambaran jelas serta memperbaiki yang salah.
7. Kecakapan bergaul: dapat mengetahui sifat dan watak orang lain melalui pergaulan agar dengan mudah dapat memperoleh kesetiaan dan kepercayaan. Sebaiknya bawahan juga bersedia bekerja dengan senang hati dan sukarela untuk mencapai tujuan.
8. Kemampuan teknis kepemimpinan: mengetahui azas dan tujuan organisasi. Mampu merencanakan, mengorganisasi, mendelegasikan wewenang, mengambil keputusan, mengawasi, dan lain-lain untuk tercapainya tujuan. Seorang pemimpin harus menguasai baik kemampuan managerial maupun kemampuan teknis dalam bidang usaha yang dipimpinya.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan situasi dan kondisi tempat peneliti mengadakan penelitian yang merupakan Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN. Termasuk di dalamnya adalah kedudukan, tugas BNN, fungsi BNN, visi BNN, misi BNN, perkembangan Direktorat psikotropika dan prekursor BNN, konsep pengawasan oleh direktorat psikotropika dan prekursor BNN dan SDM dan peralatan dalam mendukung kegiatan Direktorat psikotropika dan prekursor BNN.

#### **3.1. Kedudukan**

Direktorat psikotropika dan prekursor BNN yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Deputi bidang pemberantasan.

#### **3.2. Tugas Direktorat psikotropika dan prekursor BNN**

Direktorat psikotropika dan prekursor mempunyai tugas :  
Melakukan pengawasan terhadap impor dan ekspor prekursor non farmasi serta penggunaan untuk produksi dan pemberantasan terhadap diversi prekursor narkotika.

#### **3.3. Fungsi Direktorat psikotropika dan prekursor BNN**

Dalam melaksanakan tugasnya direktorat psikotropika dan prekursor BNN menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.
2. Pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

#### **3.4. Visi BNN**

Badan Narkotika Nasional sebagai organisasi dalam penanganan masalah narkoba memiliki visi terwujudnya masyarakat Indonesia bebas penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor dan bahan adiktif lainnya tahun 2015.

### **3.5. Misi BNN**

Dalam mewujudkan misinya BNN memiliki misi sebagai berikut:

1. Melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
2. Mengoordinasikan penyusunan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.
4. Melaksanakan pelaporan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya.

### **3.6. Perkembangan Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN**

BNN dalam melaksanakan tugasnya diantaranya adalah melakukan fungsi pengawasan psikotropika dan prekursor. Direktorat psikotropika dan prekursor memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba setelah disyahnannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009. Dalam Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2010 pasal 19 dibidang pemberantasan khususnya terhadap prekursor narkoba, direktorat psikotropika dan prekursor melakukan pengawasan terhadap impor prekursor non farmasi serta penggunaan untuk produksi dan pemberantasan terhadap *diversi* prekursor narkoba. Direktorat psikotropika dan prekursor BNN ini mulai melakukan pengawasan tahun 2010. Struktur organisasi Direktorat psikotropika dan prekursor

ini berada di bawah Deputi Bidang Pemberantasan yaitu salah satu bagian yang ada di BNN (bagian lainnya adalah Deputi Cegah, Deputi Dayanmas, Deputi Rehab, dan Deputi Hukum & Kerjasama), Direktorat psikotropika dan prekursor BNN adalah setingkat jabatan struktural eselon II

Direktorat psikotropika dan prekursor mengawaki dua subdirektorat yaitu subdirektorat psikotropika, subdirektorat prekursor dan kelompok jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pimpinan subdirektorat di lingkungan Direktorat psikotropika dan prekursor BNN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar Direktorat yang terkait pemberantasan di lingkungan BNN dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Direktorat psikotropika dan prekursor BNN mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan prekursor. Dalam melaksanakan tugasnya Direktorat psikotropika dan prekursor BNN berdasarkan Peraturan Kepala BNN Nomor:Per/03/2010/BNN menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.
2. Pelaksanaan administrasi penyidikan jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor.

### **3.7. Struktur Organisasi**

Gambar 3.7.1. Menjelaskan struktur organisasi direktorat psikotropika dan prekursor BNN yang terdiri dua subdirektorat yaitu subdirektorat psikotropika dan subdirektorat prekursor. Masing-masing subdirektorat membawahkan kelompok jabatan fungsional penyidik bertanggungjawab kepada Direktur psikotropika dan prekursor dan Direktur psikotropika dan prekursor bertanggungjawab langsung kepada Deputi Bidang Pemberantasan



Gambar 3.7.1. Struktur Organisasi Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN

### 3.9 Konsep Pengawasan Prekursor di Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN

Konsep pengawasan prekursor non farmasi adalah konsep pengawasan yang pertama kali dilaksanakan oleh Direktorat psikotropika dan prekursor. Pengawasan ini mengandung maksud agar penyalahgunaan dan peredaran gelap prekursor dapat ditekan seminimal mungkin. Selain itu pengawasan ini bertujuan terhadap impor dan ekspor prekursor non farmasi serta penggunaan untuk produksi dan terhadap *diversi* prekursor narkotika dan psiktropika.

### 3.10. Sumber Daya Manusia di Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN

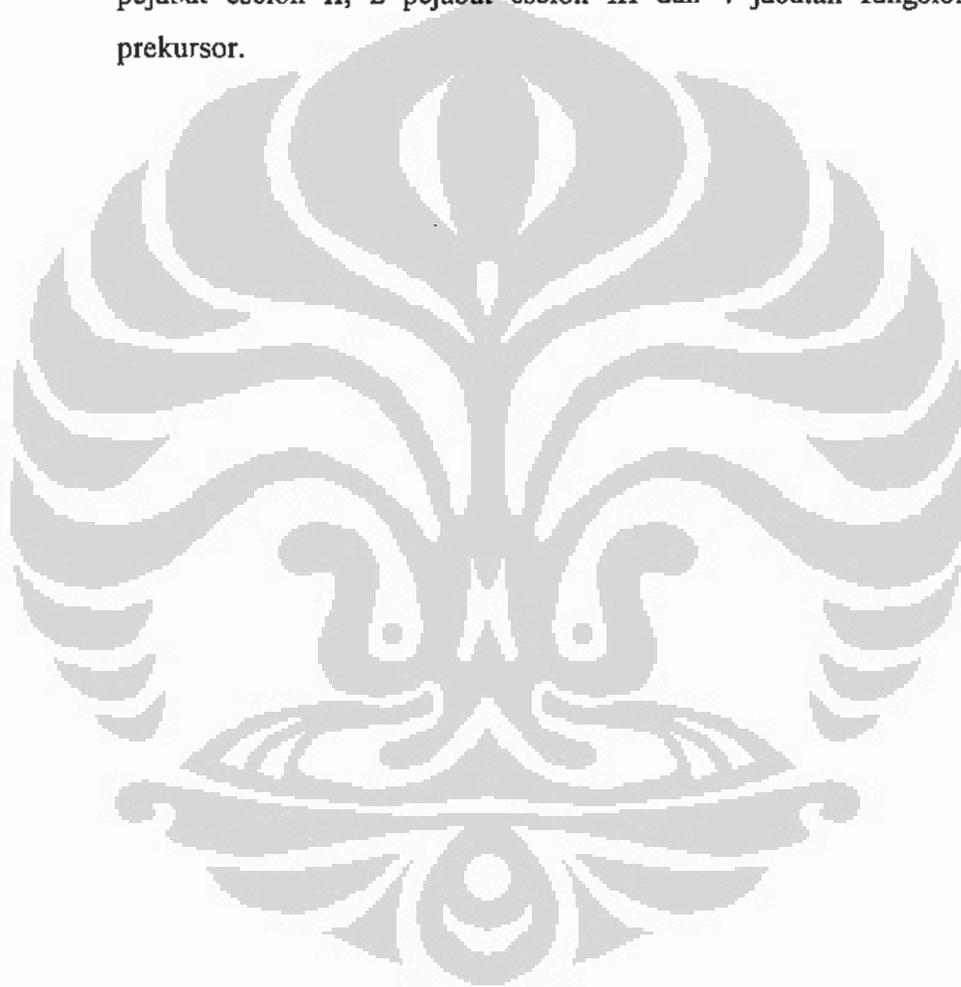
#### 3.10.1. Latar belakang pendidikan

Pelaksanaan penerbitan pelayanan di Direktorat psikotropika dan prekursor didukung oleh sumber daya manusia dengan berbagai disiplin ilmu. Pada hakekatnya kinerja individu tergantung pada kemampuan individu untuk menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tanggungjawabnya. Sedangkan

kemampuan individu terdiri dari kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Oleh karena itu, latar belakang pendidikan sangat berpengaruh pada kinerja individu dan berdampak pula terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.

### **3.10.2. Jabatan struktural dan fungsional.**

Pelaksanaan tugas Direktorat psikotropika dan prekursor didukung oleh 1 pejabat eselon II, 2 pejabat eselon III dan 4 jabatan fungsional penyidik prekursor.



## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, yaitu akan dijelaskan tipe penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, operasionalisasi faktor yang akan diteliti dan tata urutan penulisan.

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Pembahasan penelitian akan mengkaji permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah. Penulisan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efektifitas pengawasan prekursor non farmasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan.

Data yang diperoleh akan dipelajari kemudian dianalisis sehingga dapat secara mendalam memaparkan yang terjadi secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

#### **3.2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu peneliti harus mengadakan observasi secara langsung, wawancara mendalam akan dilakukan terhadap responden, agar dapat diperoleh gambaran yang utuh terhadap individu dan kegiatan pelayanan pemeriksaan narkoba. Menurut Moleong, L.J. (2006) bahwa penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.

Pendekatan kualitatif mengedepankan pemahaman terhadap fenomena yang dirasakan subyek sebagaimana adanya. Menurut Creswell (2003), paradigma yang dapat diulas melalui penelitian kualitatif diantaranya berdasarkan pendekatan ontologis, epistemologis, aksiologi, retorika dan metodologis. Secara ontologis, penelitian kualitatif akan memunculkan situasi yang diciptakan oleh individu-individu yang terlibat dalam penelitian. Secara epistemologis untuk penelitian kualitatif, peneliti terlibat secara langsung dan berhubungan intens dengan subyek

yang diteliti sehingga secara aksiologis peneliti dalam penelitian kualitatif akan melaporkan nilai dan prasangkanya yang terkadang bersifat bias namun sarat akan nilai. Secara bahasa atau retorika, penelitian kualitatif menggunakan bahasa yang lebih informal, bersifat pribadi dan berdasarkan definisi-definisi yang berkembang selama penelitian. Secara metodologi, penelitian kualitatif desainnya bersifat induktif yaitu membuat gambaran berdasarkan data-data menjadi jelas.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Pendekatan Yuridis yaitu Suatu pendekatan yang mengacu kepada undang-undang atau hukum yang berlaku.
2. Pendekatan Manajerial yaitu Berkaitan dengan pekerjaan pikiran atau menggunakan pikiran (mental) meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

### **3.3. Objek Penelitian**

Organisasi yang akan diteliti adalah Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN. Peneliti mengambil lokasi penelitian ditempat tersebut dengan pertimbangan berinteraksi langsung dengan objek penelitian sehingga memudahkan dalam wawancara maupun pengumpulan data di tempat tersebut.

### **3.4. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diambil dari orang-orang yang terlibat langsung dengan subyek penelitian yaitu :

1. Informan Kunci yaitu Seseorang yang dianggap orang yang bisa "membukakan pintu" untuk mengenali secara keseluruhan medan secara luas.
2. Informan Penting yaitu Seseorang yang dianggap mengetahui terkait dengan permasalahan secara keseluruhan.
3. Informan Tambahan yaitu Seseorang yang dianggap pernah terkait.

Data sekunder diambil dari data dan informasi yang tersedia di Direktorat psikotropika dan prekursor BNN, dan akan didapatkan data dari sumber lain terkait prekursor.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui :

1. Wawancara mendalam (in-depth interviews)

Yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada percakapan secara intensif dengan suatu tujuan tertentu wawancara dilakukan untuk mendapat informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, bahan-bahan kuliah, majalah-majalah dan Koran-koran yang kebetulan memuat penelitian ini.

### 3.6. Analisis Data

Data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu memberikan arti dan menginterpretasikan data yang diolah kemudian diuraikan menjadi bentuk uraian kalimat secara sistematis dan logis untuk kemudian diambil kesimpulan. Analisis data menggunakan analisis data secara induktif yaitu membuat atau menyusun gambaran menjadi semakin jelas sementara data dikumpulkan dan bagian-bagiannya diuji.

### 3.7. Operasionalisasi faktor –faktor yang akan diteliti

Operasionalisasi faktor-faktor yang akan diteliti akan dijabarkan menjadi tiga, yaitu faktor yang ada pada petugas pengawasan prekursor, faktor yang ada pada pengawasan prekursor dan faktor yang ada di luar pengawasan prekursor.

**Tabel 3.7.1. Kerangka Operasionalisasi Faktor Penelitian**

No.	Faktor-faktor	Jenis Data		Sumber Data
		Primer	Sekunder	
I.	Input Dalam Struktur Organisasi			
	1. Profile	wawancara		Direktur

				Psikotropika Prekursor BNN
	2. SDM	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	3. Anggaran	wawancara		Direktur: Psikotropika Prekursor BNN
II	Proses dalam Program Kegiatan			
	1. Bentuk kegiatan	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	2. Metode pelaksanaan kegiatan	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	3. Metode pelaksanaan kegiatan	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	4. Waktu yang diperlukan	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	5. Hasil kegiatan	wawancara	Dokumentasi	Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	6. Evaluasi metode yang digunakan	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	7. Tindak lanjut setelah program kegiatan	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	8. Parameter keberhasilan kegiatan	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
III.	Faktor pendukung terkait kegiatan pengawasan prekursor			
	1. Output	wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	2. Outcome	Wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	3.Feedback	Wawancara		Direktur Psikotropika Prekursor BNN

Berdasarkan faktor-faktor operasionalisasi tersebut dapat disusun pedoman wawancara sebagai berikut:

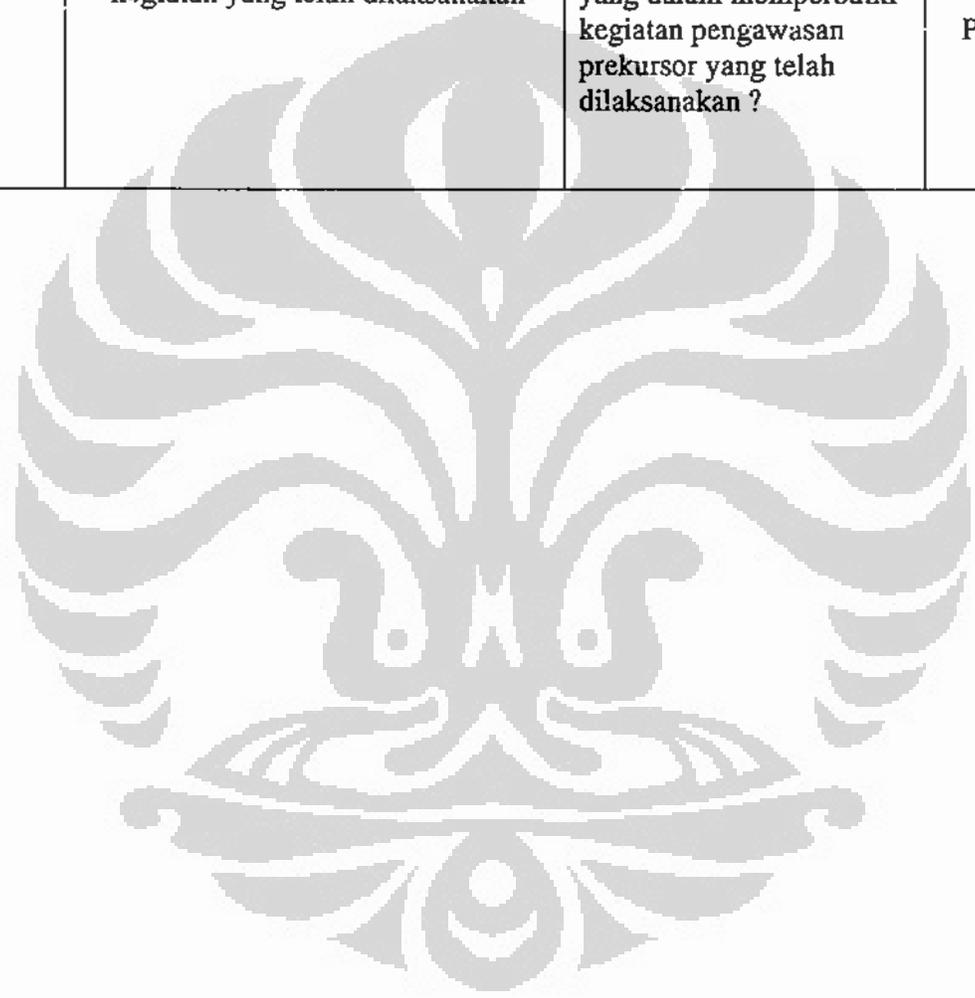
**Tabel 3.7.2. Pedoman Wawancara**

No	Faktor-faktor	Pertanyaan	Sumber Data
I.	<b>Input Dalam Struktur Organisasi</b>		
	1.Profile	1. Apa yang menjadi visi misi dalam program pengawasan prekursor? 2. Kegiatan apa saja yang dijadikan program pengawasan prekursor?	Direktur Psikotropika Prekursor BNN
	2.SDM	1. Berapa jumlah personil Direktorat Psikotropika dan prekursor saat ini ? 2. Bagaimana cara rekrutmen personel dan tenaga ahli pengawasan prekursor?	Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN
	3.Anggaran	1. Berasal darimana anggaran yang digunakan dalam program kegiatan pengawasan prekursor? 2. Apakah anggaran yang digunakan sesuai dalam program kegiatan pengawasan prekursor?	Direktur Psikotropika Prekursor BNN
II	<b>Proses dalam Program Kegiatan</b>		
	1.Bentuk kegiatan	1. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan di dalam pengawasan prekursor? 2. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan ?	-Direktur Psikotropika Prekursor BNN -Kasubdit Renmin TP Narkoba Polri
	2.Metode pelaksanaan kegiatan	1. Standarisasi kegiatan pengawasan prekursor seperti apa ? 2. Apakah sudah ideal ?	-Direktur Psikotropika Prekursor BNN -Kasubdit Renmin TP Narkoba Polri
	3.Efektifitas dan efisiensi metode yang digunakan	1. Apakah sudah efektif dan efisien metode yang digunakan dalam	-Direktur Psikotropika Prekursor BNN

		<p>pengawasan prekursor?</p> <p>2. Apa tolok ukurnya bahwa metode pengawasan efektif dan efisien ?</p>	-Kasubdit Renmin TP Narkoba Polri
	4. Waktu yang diperlukan	<p>1. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam program kegiatan pengawasan prekursor?</p> <p>2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan</p>	-Direktur Psikotropika Prekursor BNN -Kasubdit Renmin TP Narkoba Polri
	5. Hasil kegiatan	<p>1. Apakah hasil dari kegiatan pengawasan prekursor ?</p> <p>2. Apakah hasil kegiatan pengawasan prekursor memenuhi ketersediaan saat ini ?</p>	-Direktur Psikotropika Prekursor BNN - Kasubdit Renmin Tindak Pidana Narkoba Polri
	6. Evaluasi metode yang digunakan	<p>1. Bagaimana menurut anda tentang metode kegiatan pengawasan prekursor yang telah dilaksanakan ?</p> <p>2. Apakah metode kegiatan sesuai dengan kebijakan strategi BNN?</p>	-Direktur Psikotropika Prekursor BNN - Kasubdit Renmin Tindak Pidana Narkoba Polri
	7. Tindak lanjut setelah program kegiatan	<p>1. Adakah tindak lanjut setelah program kegiatan pengawasan prekursor dilaksanakan?</p> <p>2. Apa bentuk tindak lanjut tersebut ?</p>	-Direktur Psikotropika Prekursor BNN - Kasubdit Renmin Tindak Pidana Narkoba Polri
	8. Parameter keberhasilan kegiatan	<p>1. Apakah metode yang digunakan dalam kegiatan pengawasan prekursor berhasil ?</p> <p>2. Apa tolok ukurnya ?</p>	-Direktur Psikotropika Prekursor BNN - Kasubdit Renmin Tindak Pidana Narkoba Polri
III.	Faktor pendukung terkait kegiatan pengawasan prekursor		

<p><b>Output</b></p> <p>1. Sasaran yang ingin dicapai</p> <p>2. Controlling. Monitoring pengawasan yang telah dilaksanakan ?</p> <p>3. Koordinasi program kegiatan ?</p>	<p>1. Siapakah sasaran program kegiatan pengawasan prekursor?</p> <p>2. Apakah Apakah sudah tepat pada sasaran ?</p> <p>1. Bagaimana controlling, monitoring terhadap pengawasan ?</p> <p>2. Berapa jumlah target dari pengawasan tersebut?</p> <p>1. Apakah kegiatan pengawasan prekursor selalu berkoordinasi ?</p> <p>2. Apakah koordinasi sudah efektif ?</p>	<p>-Direktur Psikotropika Prekursor BNN - Kasubdit Renmin Tindak Pidana Narkoba Polri</p> <p>-Direktur Psikotropika Prekursor BNN  -Kasubdit Renmin Tindak Pidana Narkoba Polri</p> <p>-Direktur Psikotropika Prekursor BNN  -Kasubdit Renmin Tindak Pidana Narkoba Polri</p>
<p><b>Outcome</b></p> <p>1. Kepuasan</p> <p>2. Persepsi</p>	<p>1. Bagaimana pendapat anda tentang program pengawasan prekursor saat ini ?</p> <p>2. Apakah metode yang digunakan sudah tepat? mengapa?</p> <p>1. Apakah keberadaan program kegiatan pengawasan prekursor memberikan kontribusi yang positif terhadap pemberantasan penyimpangan prekursor?</p> <p>2. Apakah sudah sesuai dengan program yang telah dilaksanakan ?</p>	<p>Direktur Psikotropika Prekursor BNN</p> <p>Direktur Psikotropika Prekursor BNN</p>

	<p><b>Feedback</b></p> <p>1. Kendala-kendala pelaksanaan kegiatan dalam</p>	<p>Kendala-kendala internal dan eksternal apa saja yang dihadapi di dalam proses pelaksanaan kegiatan pengawasan prekursor?</p>	<p>Direktur Psikotropika Prekursor BNN</p>
	<p>1. Upaya-upaya perbaikan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan</p>	<p>Upaya-upaya apa saja yang dalam memperbaiki kegiatan pengawasan prekursor yang telah dilaksanakan ?</p>	<p>Direktur Psikotropika Prekursor BNN</p>



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, seberapa efektifkah pengawasan precursor non farmasi yang telah dilakukan oleh Direktorat psikotropika dan precursor BNN dalam upaya mendukung pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba tersebut dalam memberikan respons atas hasil wawancara kepada pihak BNN yaitu : Direktur Psikotropika dan Precursor, Kasubdirektorat Precursor, dan dari pihak Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Impor Perdagangan Luar Negeri, Kasubdirektorat impor precursor, Kasubdirektorat Barang Limbah Perdagangan Luar Negeri. Dan Kasubdirektorat Renmin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim POLRI yang terkait dengan pengawasan prekursor non farmasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan tersebut di atas, dapat digambarkan mengenai efektifitas pengawasan prekursor non farmasi dalam mencegah terjadinya penyimpangan melalui strategi yang dilakukan oleh Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Pemberantasan BNN dalam melakukan pemberantasan peredaran gelap prekursor. Adapun proses penelitian terhadap para informan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **5.1. Eksistensi Program Pengawasan Prekursor Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba**

##### **5.1.1. Profile**

Mengenai visi dan misi dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN bahwa kita mengungkap jaringan narkoba terarah dan terpadu tugas kita adalah pengawasan prekursor secara parsial kalau BNN dalam hal ini adalah Direktorat Psikotropika dan Prekursor Deputi Pemberantasan selama ini tidak mengawasi prekursor secara utuh, tapi mengawasi prekursor itu hanya khusus non farmasi. Kalau kedepan pengawasan ini lebih bagus lagi sebetulnya rekomendasi itu harus dari BNN termasuk farmasi.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan BNN dalam hal pengawasan prekursor hanya khusus prekursor non farmasi. Harapan kedepannya BNN dapat melakukan pengawasan prekursor farmasi sebagaimana yang dimaksud dengan instrumen pengawasan prekursor adalah diawali dengan bagaimana pengelolaan prekursor itu dimulai dari mengajukan permohonan untuk surat ijin impor prekursor.

### 5.1.2. Sumber Daya Manusia

Dijelaskan oleh Direktur Psicotropika dan Prekursor BNN ".....rekrutmen sumber daya manusia yang dilakukan BNN sudah bagus cuma penempatannya saja. Setiap tahun ada rekrutmen kemudian ada penyaringan calon pegawai sering kali memang salah kalau hanya disiplin ilmu yang berkaitan dengan prekursor tentu kaitannya dengan kesarjanaan kefarmasian, sarjana kimia bahkan mungkin disiplin ilmu yang berkaitan dengan kesehatan....."

Salah satu unsur dalam manajemen adalah sumber daya manusia yaitu menempatkan orang sesuai dengan disiplin ilmunya sehingga bisa bekerja dengan optimal. Istilah lain yang sering digunakan adalah *the right man in the right place*. Dalam hal ini para pimpinan harus bisa melihat kemampuan atau kompetensi personilnya sehingga bisa menempatkan dalam posisi yang tepat.

Menurut T. Hani Handoko (1985:4) sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan dan organisasi.

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu bidang manajemen yang memusatkan perhatiannya pada masalah pendayagunaan sumber daya manusia agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi organisasi.

Keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh kualitas orang-orang yang bekerja di dalamnya. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menuntut kemampuan mereka dalam menangkap fenomena perubahan tersebut,

menganalisa dampaknya terhadap organisasi dan menyiapkan langkah-langkah guna menghadapi kondisi tersebut.

Terkait untuk tenaga ahli, Direktorat psikotropika dan prekursor menggunakan tenaga analisis dan biologis yang berkompeten di bidangnya yang sekarang sedang dididik secara intensif supaya mereka melaksanakan tugasnya sesuai disiplin yang mereka peroleh. Contohnya, kegiatan pelatihan analisis notebook, pelatihan dasar-dasar penyidikan dan pelatihan lanjutan penyidikan yang diselenggarakan Deputi Pemberantasan BNN bertempat di Lido Sukabumi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk masalah rekrutmen harus melalui penyaringan yang ketat terutama untuk analisis dan biologis harus diperhatikan sehingga memenuhi target apa yang dicanangkan dalam visi dan misi BNN khususnya pengawasan prekursor yang ketat tentu ada kaitannya dengan masalah Sumber Daya Manusianya.

### 5.1.3. Anggaran

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN ".....anggaran yang diperoleh sementara masih demikian tapi kebutuhan lapangan karena sudah diprogramkan dalam bentuk kerjasama dengan direktorat pemberantasan. Karena ada tujuh direktorat di BNN butuh anggaran semua. Tapi khusus direktorat prekursor sekarang ini sudah mulai terasa dari tahun sebelumnya. Anggaran kedepan harus diajukan tidak lagi yang seperti sekarang karena sekarang masih belum memadai. Kebutuhan anggaran belum tercukupi sesuai dengan tujuan operasional di lapangan....."

....." anggaran yang diperoleh dari APBN....."

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu

saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada.

Menurut Munandar, (1985), pengertian anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Anggaran yang telah direncanakan oleh masing-masing institusi merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa Direktorat psikotropika dan precursor terkait anggaran masih belum maksimal, untuk tahun kedepan akan dianggarkan sesuai dengan tujuan operasional di lapangan.

## **5.2. Proses dalam pelaksanaan kegiatan**

### **5.2.1. Bentuk kegiatan**

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN bahwa “.....kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang baru saja dimulai tahun 2009 sampai sekarang sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No.35 tahun 2009. Melaksanakan pengawasan precursor yang ketat kaitannya dengan jaringan yang bisa diungkap.....”

Terkait kegiatan yang dilaksanakan Direktorat psikotropika dan precursor sebelum memiliki kewenangan dalam kegiatan oprasional

selalu koordinasikan kepada Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Karena kewenangan penyidikan khususnya projustitia ada di sini.

Sesuai program Kebijakan strategi Nasional dalam bidang pemberantasan diharapkan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi diversi (penyimpangan) terhadap bahan-bahan kimia/precursor ini digunakan di luar penggunaannya yang benar sehingga memenuhi sesuai dengan peruntukannya.

### 5.2.2. Metode pelaksanaan

Dijelaskan oleh Direktur Psicotropika dan Precursor BNN bahwa “.....keberhasilan metode pelaksanaan tidak bisa seminggu atau semester, sedangkan pemerintah ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang masalah keberhasilan relative, tapi BNN berkaitan dengan pengawasan precursor khusus precursor non farmasi dan mengawasi dari jalur *illicit* (gelap).....”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Metode ialah cara teratur yg digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yg dikehendaki; cara kerja yg bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yg ditentukan; (2) *Ling* sikap sekelompok sarjana terhadap bahasa atau linguistik, misalnya metode preskriptif, dan komparatif; (3) prinsip dan praktik pengajaran bahasa, misalnya metode langsung dan metode terjemahan;

Menurut hemat penulis terkait metode pelaksanaan yang sudah dilakukan Direktorat psicotropika dan precursor BNN berhasil atau tidak berhasil dilihat dari beberapa sisi. Kalau BNN diberikan kewenangan Undang-Undang yang baru berjalan 1 (satu) tahun keberhasilan sangat relative dan metode itu harus terus dilaksanakan agar BNN tetap eksis keseluruhan penjuror lini dalam pengawasan precursor secara ketat.

### **5.2.3. Efektifitas pelaksanaan kegiatan**

Dijelaskan oleh Direktur psikotropika dan Prekursor BNN bahwa “.....kaitannya dengan pembenahan di BNN menjadi mandiri sebagaimana dikaitkan dengan UU No.35 bahwa kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang namanya baru lahir...”

“....kalau disebut dengan efektif belum pas/belum menuju sasaran tapi dipersiapkan ya setahun sampai 2 (dua) tahun lagi bisa dianalisa.....”

Dapat dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hubungan keluaran tanggungjawab dengan sasaran yang harus dicapai. Semakin besar keluaran yang dihasilkan dari sasaran yang akan dicapai maka dapat dikatakan efektif.

Menurut Handyaningrat (1995:16) efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Terdapat cara pengukuran efektifitas yang dapat dilakukan secara umum dan yang paling menonjol adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh (Cambel, 1989:121)

Berdasarkan penjelasan di atas menurut hemat penulis bahwa keberhasilan suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan yaitu tujuan atau sasarannya tercapai tepat pada waktunya maka program tersebut dikatakan efektif. Jadi dalam hal ini BNN dalam hal ini Direktorat Psikotropika dan Prekursor yang baru diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan kewenangan penyelidikan dan penyidikan belum bisa dikatakan efektif kedepannya akan menjadi efektif kalau kewenangan tersebut masih diberikan.

### **5.2.4. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan**

Dijelaskan oleh Direktur psikotropika dan Prekursor BNN bahwa “.....beberapa tahun ini kita bersyukur bahwa BNN sudah sesuai

dengan sasaran target yang sesuai dalam program dan diharapkan dari tahun 2010 sampai 2015 Indonesia bebas narkoba tercapai.....”

Waktu sangat diperlukan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Menurut Aristotles dan Phytagoreans waktu merupakan realitas yang terus berlangsung, tidak terganggu dari obyek-obyek lain dan tanpa hubungan langsung dengan fenomena lain. Waktu secara subyektif sebagai sesuatu yang tidak punya keadaan yang terpisah dari pengamat.

Waktu sangat mempengaruhi dari sebuah aktifitas dimana suatu manajemen dengan adanya metode atau tata kerja lebih teratur karena pada proses kegiatan tersebut dapat ditangani secara bertahap dan lebih terfokus sehingga jika terjadi kejanggalan dapat lebih ditangani secara cepat dan tepat sasaran, sehingga waktu yang ada tidak terbuang dengan percuma dan tidak terjadi pemborosan. Jadi untuk mencapai tujuan dapat lebih tepat sasaran.

Sebagaimana dari uraian di atas menurut hemat penulis bahwa pelaksanaan tugas harus memperhatikan waktu terkait pelaksanaan pengawasan precursor yang dilakukan BNN harus tepat waktu sebagaimana yang diharapkan Indonesia bebas narkoba 2015 akan tercapai.

#### **5.2.5. Hasil kegiatan**

Dijelaskan oleh Direktur Psicotropika dan Prekursor BNN

“.....Hasil dikaitkan dengan program BNN diharapkan dalam pengawasan precursor membawa hasil yang baik kaitannya jaringan yang diungkap tentunya ketersediaan precursor.....”

“.....Bahwa pengawasan yang ketat bahan precursor tidak akan digunakan peruntukannya dalam pembuatan narkoba.....”

“.....Memenuhi kebutuhan sesuai dengan peruntukannya dan melakukan pengawasan paling tidak didiversi (disimpangkan).....”

“.....dilaporkan kepada pimpinan.....”

“.....laporan hasil yang dibuat bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan penentu kebijakan oleh pimpinan dan sebagai bahan evaluasi dalam berhasil atau tidak kegiatan yang sudah dikerjakan.....”

Hasil merupakan langkah awal dalam proses pelaporan kepada pimpinan dan hasil tersebut dapat ditindak lanjuti apabila terdapat unsur-unsur pidana precursor untuk dilakukan penyidikan. Hasil dari kegiatan digunakan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan penyesuaian terhadap perencanaan.

Hasil kegiatan yang dilaksanakan adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan, yang harus disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban.

Hasil kegiatan sangat perlu dilaksanakan karena merupakan alat yang penting untuk :

1. Dasar penentuan kebijakan dan pengarahan pimpinan.
2. Bahan penyusunan rencana kegiatan berikutnya.
3. Mengetahui perkembangan dan proses peningkatan kegiatan.
4. Data sejarah perkembangan satuan yang bersangkutan dan lain-lain

Berdasarkan kesimpulan di atas setiap pelaksanaan kegiatan harus ada hasilnya. Jadi hasil dari pengawasan secara ketat untuk memenuhi precursor sesuai dengan kebutuhannya.

#### **5.2.6. Evaluasi metode yang digunakan**

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN bahwa “.....evaluasi dilakukan dilakukan terus menerus agar pelaksanaan tugas dilapangan sesuai dengan SOP dan diperlukan sebagai masukan kepada pimpinan untuk perbaikan program ditahun mendatang.....”

“.....pelaksanaan kegiatan pengawasan precursor diterapkan system reward and punishment.....”

Menurut Issac dan Michael (1981) keberhasilan suatu program tidak terlepas dari segi pelaksanaannya. Oleh karena itu evaluasi terhadap metode

yang digunakan dalam suatu program akan menyangkut berbagai hal yang terkait baik yang menyangkut kualitas masukan(input), kualitas proses maupun kualitas hasil pelaksanaan (output) program. Evaluasi terhadap suatu program dapat dilaksanakan atas dasar implementasinya dapat pula dilakukan terhadap komponen programnya.

Berdasarkan hasil penelitian di atas disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan precursor harus terus dilakukan evaluasi agar dalam pelaksanaan tugas lapangan tidak menyalahi petunjuk teknis/SOP. Selain itu evaluasi pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan sehingga pimpinan dapat mengetahui dan mengambil langkah-langkah kebijakan.

#### **5.2.7. Tindak lanjut program yang telah dilaksanakan**

Dijelaskan oleh Direktur Psicotropika dan Prekursor BNN

“.....tindak lanjutnya harus terus diawasi kalau bahan precursor sudah di impor tentunya setelah masuk di gudang penyimpanan dan mereka ada pengawasan internal jadi dilakukan dengan SOP tersebut.....”

“.....Pemerintah melakukan pengawasan mulai dari menyimpan, produksi kemudian distribusi artinya pemerintah melakukan pengawasan precursor mulai dari alur impor sampai digunakan dimasyarakat.....”

#### **5.2.8. Parameter keberhasilan kegiatan**

Dijelaskan oleh Direktur Psicotropika dan precursor BNN

“.....parameter keberhasilan tidak bisa seminggu atau semester, sedangkan pemerintah ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang masalah keberhasilan relative, tapi BNN berkaitan dengan pengawasan precursor khusus precursor non farmasi dan mengawasi dari jalur *illicit* (gelap).....”

Parameter keberhasilan kegiatan yang sudah dilakukan direktorat psicotropika dan precursor BNN berhasil atau tidak berhasil dilihat

dari beberapa sisi. Kalau BNN diberikan kewenangan Undang-Undang yang baru berjalan 1 (satu) tahun keberhasilan sangat relative dan metode itu harus terus dilaksanakan agar BNN tetap eksis keseluruhan penjuru lini dalam pengawasan precursor secara ketat.

### 5.3. Output

#### 5.3.1. Sasaran yang ingin dicapai

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN Bahwa “.....untuk mencapai target harus ada sasaran, misalnya dengan target-target jaringan diputus kemudian diungkap sumber dana ini betul-betul diperhatikan.....”

“.....Bagaimana pengawasan precursor yang digunakan masyarakat dilakukan pengawasan oleh pemerintah secara rutin. Misalnya laporannya dilaporkan pemerintah melalui stakeholder siapapun pengusaha yang mengelola mulai dari tingkat importir memberikan laporan bulanan.....”

Organisasi yang didirikan tentu memiliki sasaran yang ingin dicapai secara maksimal. Oleh karenanya suatu organisasi menentukan sasaran pokok mereka berdasarkan kriteria-kriteria organisasi tertentu. Adapun sasaran yang ingin dicapai umumnya menurut J Winardi adalah:

1. Organisasi berorientasi pada pelayanan (*service organizations*), yaitu organisasi yang berupaya memberikan pelayanan yang profesional kepada anggotanya maupun pada kliennya. Selain itu siap membantu orang tanpa menuntut pembayaran penuh dari penerima servis.
2. Organisasi yang berorientasi pada aspek ekonomi (*economic organizations*), yaitu organisasi yang menyediakan barang dan jasa sebagai imbalan dalam pembayaran dalam bentuk tertentu.
3. Organisasi yang berorientasi pada aspek religius (*religious organizations*)
4. Organisasi-organisasi perlindungan (*protective organizations*)
5. Organisasi-organisasi pemerintah (*government organizations*)

## 6. Organisasi-organisasi sosial (*social organizations*).

### 5.3.2. Controlling , Monitoring program yang telah dilaksanakan

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN bahwa “.....ada action ada program ada tangkapan. Sebagai struktur organisasi dilapangan itu memang dibuat ada penanggungjawab kaumnya, siapa kalaopsnya. Sasaran apa yang akan ditetapkan minggu bulan ini dan kemudian triwulan di monitor setiap saat dan mereka akan report kepada pimpinan ini sudah baku dalam organisasi. Rekrutmen terhadap anggota yang belum menetap atau masih BKO di BNN terkait monitoringnya selalu dilaksanakan sesuai perintah pada saat opsnal dilapangan dan apa hasil yang mereka lakukan.....”

“..... Pengawasan dilakukan secara bertahap direktur diawasi dirjen, kasubdit diawasi direktur. Kasi diawasi kasubdit. Pelaksana lapangan/PPNS diawasi oleh direktur.....”

“.....Pelaksanaan kegiatan pengawasan precursor dilakukan secara internal oleh Kemendag kepada perusahaan yang mendapat izin yang diterbitkan Kemendag dan secara eksternal dilakukan pengawasan bersama instansi terkait.....”

Fungsi Pengawasan pelaksanaan tugas di semua unit organisasi sangat diperlukan yang dimaksudkan bahwa pemimpin wajib memberikan pengawasan yang berkenaan terhadap aktivitas pegawai guna menjaga organisasi agar tetap berada pada jalur yang sesuai dengan sasaran dan melakukan koreksi apabila diperlukan.

Proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi, oleh karena itu setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik, dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan

demikian peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana.

Mengenai pentingnya pelaksanaan pengawasan untuk mensukseskan rencana, Winardi (2000:172) mengungkapkan bahwa: “pengawasan berarti membuat sesuatu terjadi, sesuai dengan apa yang menurut rencana akan terjadi. Perencanaan dan pengawasan boleh dikatakan tidak dapat kita pisahkan satu sama lain, dan mereka ibarat: “kembar siam dalam bidang manajemen”.

Pengawasan bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan yang direncanakan, apakah segala instruksi telah dilaksanakan dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan pendapat Arifin Abdurrahman (1979:99) mengemukakan secara terperinci beberapa aspek yang menjadi tujuan pengawasan yaitu :

- a. Mencegah penyimpangan .
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kelemahan
- c. Mendinamisir organisasi serta segenap kegiatan manajemen yang lain
- d. Mempertebal rasa tanggung jawab
- e. Mendidik tenaga kerja

Bahwa tujuan pengawasan adalah untuk menemukan dan memperbaiki kelemahan, penyimpangan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil satu kesimpulan bahwa Dit Psikotropika dan Prekursor maupun instansi terkait lainnya telah menerapkan pengawasan pelaksanaan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung guna mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, dan untuk mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Dalam pengawasan yang telah dilaksanakan belum maksimal diberikan kepada staff atau bawahan sehingga kinerja dari organisasi dalam mencapai tujuan masih kurang.

### 5.3.3. Koordinasi program kegiatan

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN bahwa “.....koordinasi itu masih kelihatan compang campingnya pasti kelihatan dari moral apa yang dihimpun itu dalam bentuk koordinasi khusus pengawasan precursor ada ketidaksinambungan tapi karena BNN sebagai leader akan mengkoordinir secara bagus supaya pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih.....”

“.....dalam setiap kegiatan harus berkoordinasi, karena pengawasan precursor tidak bisa dikatakan sama-sama kerja tapi perlu kerjasama antar instansi terkait pengawasan precursor secara ketat.....”

‘.....dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan koordinasi antar instansi terkait agar tercipta kerjasama lintas sektor.....’

Menurut George.R. Terry koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Tujuan Badan Narkotika Nasional dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) adalah untuk mewujudkan Indonesia bebas Narkoba Tahun 2015. Oleh karena itu Direktorat psikotropika dan precursor mempunyai tujuan yang dituangkan dalam strategi nasional yaitu melakukan pengawasan yang ketat terhadap impor,produksi, distribusi,ekspor, dan re-ekspor bahan kimia precursor dan penegakan hukum terhadap jaringan tersangka yang melakukan penyimpangan precursor.

Mengingat penggunaan precursor yang luas disektor industri maka tujuan pengawasan precursor yang sedang dilaksanakan oleh Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN memerlukan kerjasama lintas sektor yang terpadu antar instansi terkait agar penyimpangan penggunaannya dapat diminimalkan. tidak bisa dilakukan sendiri. Hal ini sangat mendukung pencapaian hasil dalam melaksanakan kerjasama.

Dalam pelaksanaan pengawasan precursor koordinasi antara instansi terkait sangat penting dalam melakukan pengawasan yang terpadu dan komprehensif. dalam pelaksanaan tugas-tugas dilapangan koordinasi bisa dalam bentuk tukar menukar informasi searah yang tujuannya untuk menekan penyimpangan precursor, koordinasi akan mensinergikan pelaksanaan tugas pengawasan precursor sehingga penyalahgunaan gelap precursor dapat diminimalkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dalam berkoordinasi adalah agar tidak terjadi ketidaksinambungan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Oleh karena itu BNN dalam hal ini Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN harus membenah dan membuka diri dalam hal koordinasi yang bisa menghimpun semua organisasi dalam satu kesepakatan dan satu perbuatan yang dinikmati bersama itu yang paling utama.

#### **5.4. Outcome**

##### **5.4.1. Kepuasan program kegiatan**

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN bahwa “.....kita telah mengungkap satu kasus narkoba dengan jaringan internasional di hongkong, di china dengan melibatkan orang lapas. Kita ketahui bahwa memang tahun 2011 ini pengungkapan jaringan narkoba di lapas. Termasuk di direktorat psikotropika dan precursor sudah memberkas dan sudah ada putusan lima belas tahun dan denda satu milyar.....”

Wexley dan Yukl mengartikan kepuasan kerja sebagai “*the way an employee feels about his or her job*”. Artinya bahwa kepuasan kerja adalah cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dalam diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upaya, kesempatan pengembangan karier, hubungan dengan

pegawai lain, penempatan kerja, dan struktur organisasi. Sementara itu, perasaan yang berhubungan dengan dirinya antara lain berupa umur, kondisi kesehatan, kemampuan dan pendidikan.

Aspek-aspek lain yang terdapat dalam kepuasan kerja :

1. Kerja yang secara mental menantang, Kebanyakan Karyawan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dan menawarkan tugas, kebebasan dan umpan balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan. Karakteristik ini membuat kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang terlalu kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi terlalu banyak menantang menciptakan frustrasi dan perasaan gagal. Pada kondisi tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan.
2. Gajaran yang pantas, Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang mereka persepsikan sebagai adil, dan segaris dengan pengharapan mereka. Pemberian upah yang baik didasarkan pada tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. tidak semua orang mengejar uang. Banyak orang bersedia menerima baik uang yang lebih kecil untuk bekerja dalam lokasi yang lebih diinginkan atau dalam pekerjaan yang kurang menuntut atau mempunyai keleluasaan yang lebih besar dalam kerja yang mereka lakukan dan jam-jam kerja. Tetapi kunci yang manakutkan upah dengan kepuasan bukanlah jumlah mutlak yang dibayarkan; yang lebih penting adalah persepsi keadilan. Serupa pula karyawan berusaha mendapatkan kebijakan dan praktik promosi yang lebih banyak, dan status sosial yang ditingkatkan. Oleh karena itu individu-individu yang mempersepsikan bahwa keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil (*fair and just*) kemungkinan besar akan mengalami kepuasan dari pekerjaan mereka.
3. Kondisi kerja yang mendukung, Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan

tugas. Studi-studi memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik yang tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur (suhu), cahaya, kebisingan, dan faktor lingkungan lain seharusnya tidak ekstrem (terlalu banyak atau sedikit).

4. Rekan kerja yang mendukung, Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja juga mengisi kebutuhan akan sosial. Oleh karena itu bila mempunyai rekan sekerja yang ramah dan menyenangkan dapat menciptakan kepuasan kerja yang meningkat. Tetapi Perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan.
5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan, Pada hakikatnya orang yang tipe kepribadiannya kongruen (sama dan sebangun) dengan pekerjaan yang mereka pilih seharusnya mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Dengan demikian akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan tersebut, dan karena sukses ini, mempunyai kebolehdjadian yang lebih besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi dari dalam kerja mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kepuasan kerja sangat di butuhkan setiap pekerja baik berupa gaji dan promosi jabatan yang adil, kenyamanan, kebutuhan social, mempunyai bakat dan kemampuan yang tepat. Oleh karena itu direktorat psikotropika dan precursor harus terus melaksanakan pengungkapan kasus terutama pemutusan jaringan/sindikatan nasional maupun internasional dengan begitu akan memberikan kepuasan tersendiri maupun bagi institusi BNN sendiri.

#### **5.4.2. Persepsi program yang telah dilaksanakan**

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN

“.....ya tentunya membawa dampak yang baik pada pengawasan precursor digunakan sesuai dengan peruntukannya kalau diluar itu

akan ditepis bahwa memang precursor itu betul digunakan kesejahteraan masyarakat.....”

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh seseorang di dalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui lingkungan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman (Thoha :1980).

Agar seseorang dapat menyadari dan dapat melakukan persepsi ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi antara lain :

1. Adanya objek yang di persepsi. Objek menimbulkan yang mengenai alat indera atau reseptor. Stimulus dapat datang dari luar langsung datang dari dalam yang langsung mengenai syaraf penerima tapi berfungsi sebagai reseptor.
2. Adanya indera atau reseptor yaitu sebagai alat untuk menerima stimulus.
3. Diperlukan adanya perhatian sebagai langkah awal menuju persepsi.

Jika rangsangan merupakan factor eksternal dalam proses pengamatan maka factor individu merupakan factor internal. Menghadapi rangsangan dari luar itu seseorang bersikap selektif untuk menentukan rangsangan mana yang akan diperhatikan sehingga menimbulkan kesadaran. Melalui proses selektif terhadap suatu rangsangan, seseorang dapat mempunyai tanggapan atau pendapat tentang objek tertentu. Dalam hal ini persepsi dapat diukur dari proses memberikan nilai terhadap objek tertentu dari orang tersebut.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi sangat diperlukan terhadap program yang telah dilaksanakan Direktorat Psikotropika dan Prekursor dalam pelaksanaan tugasnya, sehingga masyarakat dapat melihat, mendengar sendiri apa yang dihasilkan dalam pengawasan precursor sehingga membawa dampak yang baik terhadap kinerja pengawasan precursor.

## 5.5. Feedback

### 5.5.1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan program

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN bahwa “.....berkaitan bagaimana kita menyusun satu satu program yang kaitannya dengan anggaran ada kendala disana.....”

“.....Bahwa Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN dihimpun dalam satu kedeputian satu deputy tidak boleh ada deputy lagi deputy ini harus menghimpun tujuh direktorat ini juga menjadi kendala....”

“.....Bagaimana direktorat psikotropika dan precursor dengan direktorat lain kalau tidak ada kesinambungan pada saat kegiatan operasional misalnya dalam pencapaian target tidak akan pernah tercapai.....”

“.....Bagaimana kita mau bersama apa yang sudah kita sepakati harus dinikmati bersama jangan BNN yang menikmati dikarenakan BNN sebagai penjur....”

“.....Rekrutmen Sumber Daya Manusia nya, struktur keorganisasian itu juga merupakan kendala....”

“.....Antar deputy dengan deputy lainnya harus solid karena kita membawa bahasa BNN bagaimana kita satu dalam wadah yang di banggakan kedepannya untuk menuntaskan Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kalau antar deputy tidak sinkron dan sinergis....”

“.....Kita harus merangkul instansi terkait, belum hubungan keluar negeri mengembangkan koordinasi yang bagus supaya kita berkembang agar dunia internasional baik dalam konteks pengawasan precursor.....”

Kendala-kendala yang ditemukan dilapangan juga perlu diberikan pemecahannya yang tepat agar tidak menjadi hambatan pelaksanaan dimasa yang akan datang. Kendala bisa saja berasal dari internal maupun eksternal. Barangkali juga dapat ditemukan kendala yang sifatnya teknis, mental, ataupun kualitas SDM pelaksananya.

Dalam memecahkan kendala atau masalah yaitu harus melihat sasaran dan kondisi yang diinginkan. Jadi pemecahan masalah mengarah pada pemikiran atau sasaran dan harapan yang ideal ketika sebuah sasaran terpenuhi maka

kendala atau masalah tadi bisa diselesaikan. Sasaran memang cukup layak untuk memecahkan masalah.

Seorang pemimpin harus mempunyai langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut dalam ukuran lebih. Sehingga disini pemimpin tahu strategi yang bagaimana bisa menyelesaikan kendala atau masalah. Karena pada umumnya kendala atau masalah akan selesai dengan berbagai macam hasil sesuai dengan langkah pemecahan masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas bahwa Direktorat Psikotropika dan Prekursor masih banyak kendala atau permasalahan yang sedang dihadapi baik itu masalah anggaran, satuan kerja lingkup ke deputian kurang konsolidasi sehingga tidak ada sinkronisasi dan sinergis, terkait rekrutmen sumber daya manusia, masalah struktur organisasi, koordinasi dengan instansi terkait dan hubungan luar negeri belum terjalin secara baik. Ini semua menjadi kendala apabila tidak di selesaikan jadi harus dicari pemecahan permasalahan itu dengan melihat sasaran dan harapan yang ideal kendala atau masalah tersebut dapat diselesaikan.

#### **5.5.2. Upaya-upaya perbaikan dalam pelaksanaan program**

Dijelaskan oleh Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN :

“.....untuk internal ke deputian tentu ada peningkatan di direktorat psikotropika dan prekursor dengan direktorat lainnya yang ada di BNN betul-betul memahami apa pekerjaannya jangan sampai itu tidak sinergis malah duplikasi.....”

“.....Upaya bagaimana kita usulkan supaya re- struktur organisasi perlu ada pemahaman yang lebih jauh lagi bahwa untuk mencapai target dalam wadah BNN tentunya ada rekrutmen.....”

“.....Bagaimana kiprah Indonesia di dunia internasional ada beberapa tahapan yang harus dilalui supaya Indonesia betul-betul berkiprah didunia internasional contohnya BNN ditunjuk sebagai penjurur *IDEC* tahun 2012 tentunya Indonesia harus menunjukkan sejajar dengan negara-negara maju dalam konteks Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap

Narkoba (P4GN) nanti kaitannya dengan operasional yang telah dicapai.....”

Upaya untuk melakukan pemecahan masalah yang dilakukan dengan melihat masalah yang ada secara menyeluruh dan melakukan analisis secara sistem. Pendekatan sistem diperlukan apabila kita menghadapi suatu masalah yang kompleks sehingga diperlukan analisa terhadap permasalahan tadi, untuk memahami hubungan bagian dengan bagian lain dalam masalah tersebut, serta kaitan antara masalah tersebut dengan masalah lainnya.

Menurut Alex Osborn dalam upaya memecahkan masalah atau kendala melihat langkah-langkah sebagai berikut :

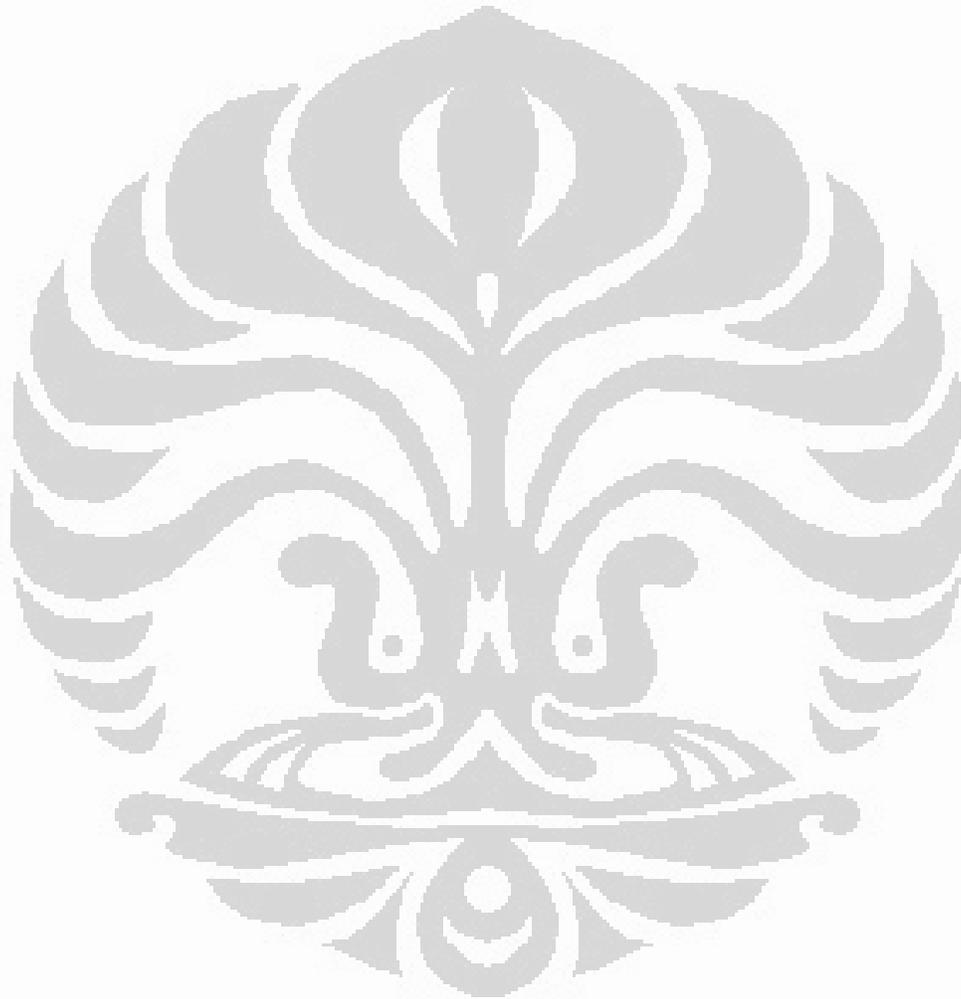
- a) Orientation. Merupakan proses perumusan, pembatasan, untuk tentukan inti masalah yang hendak dipecahkan.
- b) Preporation. Merupakan proses pengumpulan data, yang berhubungan dengan inti masalah.
- b) Analisa. Merupakan proses pengujian, penelaahan & pembahasan mendalam terhadap semua data.
- c) Ideation. Merupakan proses penganalisaan untuk temukan percobaan yang digunakan.
- d) Incubation. Merupakan proses kemungkinan percobaan yang ditemukan untuk mendapatkan percobaan yang lengkap & mantap dengan menggunakan hasil analisa.
- e) Synthesis. Merupakan proses penyorotan terhadap kemungkinan percobaan yang akan dipecahkan.
- f) Verification. Merupakan proses terakhir untuk mendapatkan percobaan yang paling tepat.

Secara ringkas langkah-langkah upaya pemecahan masalah disimpulkan sebagai berikut:

- a) Rumuskan masalah & cara pendekatannya.
- b) Pengumpulan data.
- c) Analisa.
- d) Pematangan percobaan.

e) Penjabaran percobaan yang terbaik.

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa upaya diperlukan dalam pemecahan permasalahan terutama di Direktorat psikotropika dan prekursor perlu suatu pendekatan sistem dengan melihat permasalahan secara menyeluruh dan menganalisa secara benar.



## BAB VI SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Simpulan

Simpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bahwa terkait kewenangan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Direktorat Psikotropika dan Prekursor BNN dan instansi terkait dalam melakukan pengawasan prekursor non farmasi belum efektif hal ini dapat diamati bahwa kewenangan BNN dalam hal ini Dit Psikotropika dan Prekursor tersebut baru dilaksanakan setelah ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu pula belum efektifnya pengawasan prekursor saat ini adalah ketidaksinambungan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan, belum menerapkan kerjasama antar instansi terkait terutama dalam pengawasan prekursor.
2. Selain hal tersebut di atas, kegiatan pengawasan prekursor yang dilaksanakan harus ada suatu hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan prekursor itu sendiri hal ini dapat diamati dengan pengawasan prekursor yang ketat akan membawa hasil yang baik terkait jaringan yang diungkap. Pengawasan prekursor yang digunakan sesuai dengan peruntukannya tentu tidak akan disalahgunakan untuk pembuatan narkotika dan psikotropika. Prekursor harus sesuai dipergunakan untuk kebutuhan masyarakat sehingga ketersediaan prekursor sesuai dengan peruntukannya.
3. Kendala internal dalam pengawasan prekursor sumber daya manusia yaitu masalah rekrutmen pegawai sampai penempatannya belum terpenuhi seperti kurangnya kesarjanaan farmasian, sarjana kimia, sarjana biologi. Terkait masalah anggaran yang belum memadai hal ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan prekursor. Terkait masalah kewenangan

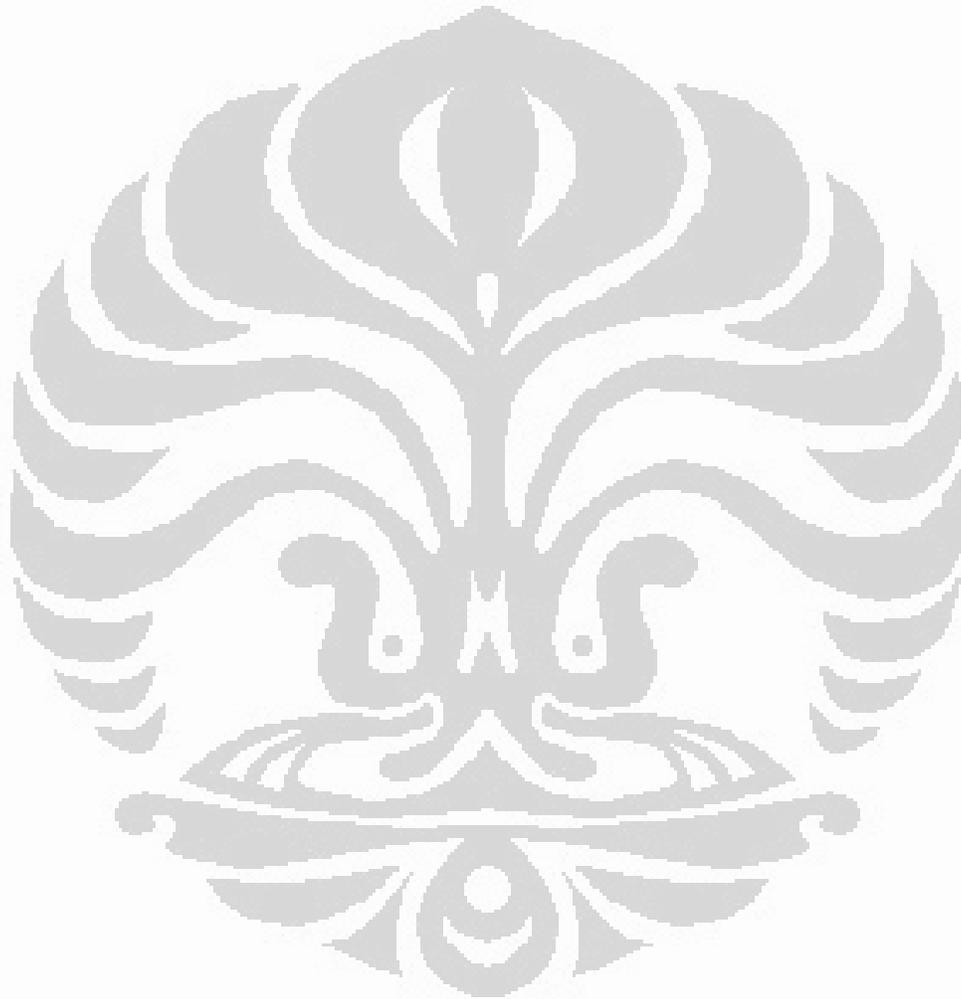
dalam mengambil keputusan yang dilakukan stakeholder terjadi tumpang tindih kewenangan. Masalah eksternal seperti belum adanya sinkronisasi dan sinergis dalam pelaksanaan tugas Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Masalah koordinasi antara BNN dengan instansi terkait dalam hal pengawasan prekursor masih berpola sama-sama kerja belum menerapkan pola kerjasama di bidang pengawasan prekursor. Dalam hal menjalin hubungan internasional dengan pihak luar negeri terkait pengawasan prekursor belum ada perjanjian kerjasama.

## 6.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan pada penelitian ini adalah:

1. Hendaknya dalam hal kewenangan BNN melakukan pengawasan prekursor akan efektif yaitu setahun sampai dua tahun kedepan akan kelihatan hasilnya. Selain itu perlu adanya kerjasama antar instansi terkait berupa saling tukar menukar informasi, melaksanakan operasional di lapangan bersama-sama, sehingga pengawasan prekursor tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan ketidaksinambungan dalam pelaksanaan tugas.
2. Hendaknya di dalam kegiatan pengawasan prekursor harus dilaksanakan secara rutin agar hasil dari pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut terus-menerus terpenuhinya kebutuhan/ketersediaan prekursor saat ini.
3. Hendaknya perlu memperbaiki hubungan kerjasama internal diantara kedeputian di BNN ataupun di masing-masing direktorat yang ada di deputi pemberantasan BNN dengan cara berkolaborasi dalam pengungkapan kasus di lapangan. Masalah rekrutmen perlu diperhatikan secara serius mulai dari penerimaan hingga penempatan agar personil yang melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan disiplin ilmu yang diharapkan. Hubungan kerjasama internasional

dengan pihak luar negeri bisa dalam suatu penandatanganan nota kesepahaman yang tujuannya adanya hubungan timbal balik terkait penanganan prekursor.



## DAFTAR PUSTAKA

**Adnil, Edwin Nurdin.** *Madat: Sejarah, Dampak Klinis, dan Penyalahgunaanya.* Padang: MW, 2007.,

**Atmosoepipto, Kisdarto,** 2002. *Menuju SDM Berdaya – Dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien,* PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

**Andi Hamzah.** 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia.* Jakarta : Sinar Grafika.

**Abdurahman, Arifin,** *Teori Pengembangan dan Filosofi Kepemimpinan Kerja,* Jakarta, Bhatara, 1981.

**Amirullah, dan Hanafi, Rindyah.** *Pengantar Manajemen.* Yogyakarta: Graha Ilmu 2002.

**CFG Sunaryati Hartono.** *Kapita selekta Hukum Ekonomi.* Jakarta: Binacipta, 1976.

**Dr. Lexy, J. Meleong, M.A,** *Metodelogi Penelitian Kualitatif,* lembaga Penerbit PT. Remaja Rosdikarya, Bandung 1999

**Fayol, Henry.** *Administration, industrielle et generale.* 1949

**Gibson, James, L, John. M, Ivancevich dan James H. Donnelly Jr,** *Organisasi dan Manajemen,* terjemahan oleh Djoerban Wahid, Penerbit Erlangga, Jakarta. 1984

**George, R.Terry, PhD,** *Azas-azas Management,* Alumni Bandung, 1986

**Gibson, Ivancevich & Donnelly,** 1997, *Organisasi Jilid I,* Terjemahan Darkasih. Jakarta : Erlangga.

**Jhon, W. Cresswell,** *Research Design Qualitative and Quantitative Approaches,* Edisi Revisi Cetakan Kedua, Penerbit Kik Press, 2002

**J. Winardi,** *Motivasi dan Pemotivasian,* Cetakan Pertama, Penerbit PT Raya Grafindo Persada, Jakarta 2001

**J.P.Cambel.** *Riset Dalam Efektifitas Organisasi,* Terjemahan Sahat Simamora, 1987

**Keith Davis,** *Human Relations at Work,* (New York, San Francisco, Toronto, London: 1962)

Lawrence, M. Friedman. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*. Penerjemah Wisnu Basuki. Jakarta: tata Nusa, 2001.

M, Aslam Sumhudi. *Komposisi Disain Riset*. Jakarta: Lembaga Penelitian Univ. Trisakti, 1956.

Maria, SW, Sumardjono. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*. Yogyakarta: FH-UGM, 1989.

*Majalah Bulanan BNN "Sadar"*, No.04/Th.IV/April 2006.

M.Yahya Harahap. 1988. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.

Ronny, Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Robert Bacal. *Manajemen Kinerja*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1989.

Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1988.

Stoner, James AF, Alfonsus Sirait, 1996. *Manajemen*. Jakarta. Erlangga.

Siagian, Sondang P., 1989. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Haji Mas Agung.

Terry, George R. *Asas-asas Manajemen Alih Bahasa*; Winardi. Bandung: Penerbit Alumni. 1986

Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Edisi 10 Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika dan Prekursor Narkotika.

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997** Tentang Psikotropika

Wexley, K.N. Yukl, G.A, *Organizational Behavior and Personal Psychology*, Ricard D. Erwin Inc. Homewood illinois, 1977

**Keputusan Kepala Badan POM** No: HK 00.05.02771/2002 tanggal 4 September 2002 tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor Narkotika, Psikotropika, yang mengatur izin impor untuk 15 jenis prekursor (dibagi tabel I dan II/khususnya yang tercantum dalam tabel I). Sedangkan untuk 8 jenis prekursor lainnya tercantum dalam tabel II (untuk keperluan industri) pada saat itu belum diatur.

**Peraturan Menkes** No: 168/Menkes/Per/II/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Prekursor Farmasi mengatur izin impor terhadap 25 jenis prekursor tidak dibagi tabel I dan II khususnya untuk kepentingan farmasi.

*International Narcotic Control Board (INCB)* dan negara-negara lain serta eksportir internasional mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi instansi yang berwenang dalam pengawasan ekspor/impor prekursor ke Indonesia.

“Daftar prekursor-prekursor penting dan penggunaan yang legal dan illegal”, Majalah Figur edisi VI Tahun 2006, Jakarta, 2006

Polisi Berhasil Membongkar 50 Laboratorium Narkoba Yang Diduga Makin Marak Menjamur Di Indonesia”, <http://akuindonesiana.wordpress.com/category/taat-hukum/>

## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Transkrip Wawancara dengan Direktur Psikotropika dan Prekursor BNN :

- a. Kegiatan yang dilaksanakan di dalam pengawasan prekursor?

Jawab:

kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang baru saja dimulai tahun 2009 sampai sekarang sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang No.35 tahun 2009. Melaksanakan pengawasan precursor yang ketat kaitannya dengan jaringan yang bias diungkap.

- b. Apakah sudah efektif metode yang digunakan dalam pengawasan prekursor?

Jawab:

Kaitannya dengan pembenahan di BNN menjadi mandiri sebagaimana dikaitkan dengan UU No.35 bahwa kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang namanya baru lahir kalau disebut dengan efektif belum pas/belum menuju sasaran tapi dipersiapkan ya setahun sampai 2 (dua) tahun lagi bisa dianalisa.

- c. Standarisasi kegiatan pengawasan prekursor seperti apa ?

Jawab:

Keberhasilan metode pelaksanaan tidak bisa seminggu atau semester, sedangkan pemerintah ada program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang masalah keberhasilan relative, tapi BNN berkaitan dengan pengawasan precursor khusus precursor non farmasi dan mengawasi dari

jalur *illicit* (gelap) Metode kegiatan apa yang ideal, khususnya saat ini untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat?

- d. Apakah sudah efektif metode yang digunakan dalam pengawasan prekursor?

Jawab:

Kaitannya dengan pembenahan di BNN menjadi mandiri sebagaimana dikaitkan dengan UU No.35 bahwa kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang namanya baru lahir kalau disebut dengan efektif belum pas/belum menuju sasaran tapi dipersiapkan ya setahun sampai 2 (dua) tahun lagi bisa dianalisa.

- e. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam program kegiatan pengawasan prekursor?

Jawab:

Beberapa tahun ini kita bersyukur bahwa BNN sudah sesuai dengan sasaran target dalam program dan diharapkan dari tahun 2010 sampai 2015 Indonesia bebas narkoba tercapai.

- f. Apakah hasil dari kegiatan pengawasan prekursor ?

Jawab:

Hasil dikaitkan dengan program BNN diharapkan dalam pengawasan precursor membawa hasil yang baik kaitannya jaringan yang diungkap tentunya ketersediaan precursor

- g. Bagaimana menurut anda tentang metode kegiatan pengawasan prekursor yang telah dilaksanakan ?

Jawab :

Evaluasi dilakukan terus menerus agar pelaksanaan tugas dilapangan sesuai dengan SOP dan diperlukan sebagai masukan kepada pimpinan untuk perbaikan program ditahun mendatang.

- h. Adakah tindak lanjut setelah program kegiatan pengawasan prekursor dilaksanakan ?

Jawab :

Tindak lanjutnya harus terus diawasi kalau bahan precursor sudah di impor tentunya setelah masuk di gudang penyimpanan dan mereka ada pengawasan internal jadi dilakukan dengan SOP tersebut.

- i. Siapakah sasaran program kegiatan pengawasan prekursor ?

Jawab :

Untuk mencapai target harus ada sasaran, misalnya dengan target-target jaringan/sindikate prekursor diputus kemudian diungkap sumber dana ini betul-betul diperhatikan.

- j. Bagaimana pendapat anda tentang program pengawasan prekursor saat ini ?

Jawab :

Kalau pencapaian sudah mulai kelihatan. Misalnya kita telah mengungkap satu kasus narkoba dengan jaringan internasional di hongkong, di china dengan melibatkan orang lapas. Kita ketahui bahwa memang tahun 2011 ini pengungkapan jaringan narkoba di lapas. Termasuk di direktorat psikotropika dan precursor sudah memberkas dan sudah ada putusan lima belas tahun dan denda satu milyar.

## 2. Transkrip Wawancara dengan Kasubdit Renmin TP Narkoba Bareskrim Polri

a. Apakah sudah efektif metode yang digunakan dalam pengawasan prekursor?

Jawab:

Pengawasan prekursor saat ini belum efektif karena masing-masing instansi belum adanya kerjasama dalam hal pengawasan prekursor.

b. Standarisasi kegiatan pengawasan prekursor seperti apa ?

Jawab:

Kegiatan pengawasan prekursor harus mengacu kepada strategi nasional di bidang pemberantasan yaitu mencegah terjadinya diversifikasi prekursor menjadi narkotika dan psikotropika.

c. Apakah sudah efektif metode yang digunakan dalam pengawasan prekursor?

Jawab:

Kalau metode yang dilaksanakan dalam pengawasan prekursor selama ini sudah efektif hanya setelah pelaksanaan dilapangan itu yang harus ada pemantauan terus menerus.

d. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam program kegiatan pengawasan prekursor?

Jawab:

Harus dilakukan secara rutin untuk mencegah penyimpangan secara illegal karena kalau sampai tidak terawasi prekursor tersebut akan digunakan tidak sesuai peruntukannya. Jadi harus dilakukan pengawasan terus-menerus secara ketat.

e. Apakah hasil dari kegiatan pengawasan prekursor ?

Jawab:

Dalam pelaksanaan pengawasan diperlukan pelaporan pelaksanaan kegiatan agar diketahui oleh pimpinan.

f. Bagaimana menurut anda tentang metode kegiatan pengawasan prekursor yang telah dilaksanakan ?

Jawab :

Harus tetap mengacu pada petunjuk teknis dan aturan yang berlaku di instansi masing-masing

g. Adakah tindak lanjut setelah program kegiatan pengawasan prekursor dilaksanakan ?

Jawab :

Tindak lanjutnya harus terus diawasi kalau bahan prekursor sudah di impor tentunya setelah masuk di gudang penyimpanan dan mereka ada pengawasan internal jadi dilakukan dengan SOP tersebut.

h. Siapakah sasaran program kegiatan pengawasan prekursor ?

Jawab :

Sasaran dalam pengawasan prekursor yaitu mencegah terjadinya penyimpangan prekursor ilegal, tata kelola dan manajemen penggunaan prekursor oleh industri (legal), memberantas peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

i. Bagaimana pendapat anda tentang program pengawasan prekursor saat ini ?

Jawab :

Program semua sama yaitu melakukan rangkaian kegiatan mulai dari pengawasan prekursor yang legal sampai terjadi penyimpangan (diversi) dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan tujuan pencegahan pemberantasan peredaran gelap narkoba (P4GN).

